# COALRUPTION

## Elite Politik dalam Pusaran Bisnis Batu bara

GREENPEACE

# Daftar Isi



# Daftar Gambar



# Daftar Kotak



# Daftar Tabel

# Coalruption – Elite Politik dalam Pusaran Bisnis Batu bara

## *Ringkasan Eksekutif*

**Batu bara: sumber pendanaan kampanye politik**

Dengan pertumbuhan yang cepat dalam 20 tahun terakhir, sektor batu bara telah menjadi salah satu sumber utama pendanaan politik di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun daerah. Pemain kunci di industri batu bara memainkan peranan penting dalam pemilihan presiden 2019, baik di tim kampanye Joko Widodo-Ma'ruf Amin maupun Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Para calon dan tim inti kampanye berbisnis dan terkait dengan sektor batu bara.

Di tingkat provinsi dan kabupaten, pilkada langsung dalam konteks desentralisasi memerlukan pendanaan politik yang tidak sedikit. Uang dari bisnis pertambangan batu bara kemudian mengisi kebutuhan pendanaan bagi para kandidat dalam pilkada. KPK dan organisasi masyarakat sipil mencatat adanya kenaikan tajam jumlah izin pertambangan saat kampanye pilkada atau segera setelah pilkada selesai.

**Batu bara, korupsi politik, dan oligarki lama**

Kebutuhan terhadap modal yang besar, keterkaitan erat dengan peraturan pemerintah, adanya royalti dan pajak serta ketergantungan terhadap infrastuktur pemerintah untuk mengirimkan batu bara ke pasar menjadikan sektor ini terpapar korupsi politik, dalam bentuk perdagangan pengaruh, *political capture* dan *regulatory capture.* Perusahaan pertambangan batu bara harus berurusan dengan pejabat publik, yang kemudian mendorong "perselingkuhan" antara perusahaan, birokrat, dan politisi. Para elit politik juga menyatukan bisnis dengan politik di sektor pertambangan batu bara, antara lain Aburizal Bakrie (mantan Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar serta mantan menteri di Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono) dengan Bumi Resources dan Prabowo Subianto (pendiri dan Ketua Umum Partai Gerindra) dengan grup bisnis Nusantara.

Terdapat elite politik dengan konflik kepentingan politik yang besar di bisnis batu bara. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, yang membawahi sektor pertambangan dan energi merupakan pemegang saham PT Toba Sejahtra, perusahaan ini memiliki sejumlah anak perusahaan yang terlibat dalam pertambangan batu bara dan PLTU. Beberapa *politically-exposed persons* (PEPs) lainnya terhubungkan dengan kelompok bisnis ini, termasuk anggota keluarga Luhut, mantan menteri serta pejabat tinggi lainnya, dan pensiunan jenderal.

Dalam menyatukan bisnis dan politik di sektor batu bara, Luhut menggunakan struktur lama oligarki politik: istana kepresidenan, militer, dan partai politik terutama Partai Golkar. Dia juga menggunakan lanskap baru yaitu desentralisasi dengan bekerja sama dengan elite dan penguasa lokal. Di Partai Golkar, Luhut terkoneksi dengan Aburizal Bakrie, Idrus Marham, Azis Syamsuddin, Syaukani Hasan Rais, dan Rita Widyasari.

Hukum di Indonesia mewajibkan perusahaan termasuk di sektor pertambangan batu bara untuk mengungkapkan pemilik sah perusahaan tersebut sebagaimana didaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM. Namun, pemilik manfaat, atau *benifical owner*, masih dapat menyembunyikan keterlibatan mereka.

**Lanskap baru: desentralisasi dan korupsi politik**

Sebelum tahun 1999, peraturan dan izin pertambangan dikelola oleh pemerintah pusat. Setelah pelaksanaan desentralisasi, politisi di daerah mendapatkan kekuasaan yang lebih besar dalam pengelolaan sumber daya alam di wilayah mereka. Elite politik di daerah memiliki kekuasaan untuk menerbitkan izin pertambangan, terutama sebagai bagian dari pendanaan politik.

Hal ini menyebabkan kenaikan tajam dalam jumlah izin pertambangan yang diterbitkan, naik dari 750 pada pertengahan tahun 2001 menjadi lebih dari 10 ribu pada tahun 2010, yang merupakan kenaikan 13 kali, hampir setengahnya adalah izin  pertambangan batu bara.

Kenaikan jumlah izin pertambangan batu bara ini -bersamaan dengan tingkat keuntungan yang tinggi dari batu bara dan subsidi negara yang besar- menarik banyak elite politisi atau pengusaha dengan koneksi politik *(politically exposed persons)* ke dalam industri tersebut, yang kemudian menyebabkan korupsi politik. Di awal tahun 2000, beberapa perusahaan asing menjual sahamnya di perusahaan pertambangan batu bara kepada pengusaha Indonesia yang memiliki kekuasaan dan koneksi politik.

**Kalimantan Timur: bukti korupsi batu bara yang nyata di Indonesia**

Kalimantan Timur merupakan salah satu pusat industri batu bara di Indonesia di mana terdapat banyak lubang tambang yang ditelantarkan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, lubang-lubang tersebut harus direstorasi dan ditanami kembali jika tidak lagi digunakan namun banyak perusahaan mengabaikannya.  Hingga bulan Desember 2018, jumlah korban yang ditelan oleh lubang tambang batu bara di Kalimantan Timur mencapai 31 orang. Perusahaan tambang dapat melakukan hal tersebut tanpa konsekuensi hukum karena pemiliknya memiliki kekuasaan dan koneksi politik, seperti yang dilakukan beberapa perusahaan di dalam kelompok bisnis PT Toba Sejahtra yang dimiliki Luhut Binsar Pandjaitan.

Beberapa konflik lahan yang melibatkan Kutai Energi -salah satu perusahaan di dalam grup Toba Sejahtra- juga tidak memperoleh penyelesaian bahkan pada saat keputusan pengadilan telah memenangkan masyarakat lokal. Hal ini telah menyebabkan masyarakat lokal kehilangan akses terhadap penghidupan. Lubang tambang tersebut juga telah mencemari sungai yang sangat penting keberadaan dan fungsinya bagi masyarakat.

**Bagaimana korupsi batu bara menghancurkan Indonesia**

Indonesia telah mendapatkan julukan “the dirty man of Asia” karena ketergantungan terhadap batu bara, yang secara aktif didorong oleh *politically exposed persons* untuk keuntungan pribadi mereka. Rencana pemerintah Indonesia untuk mengurangi produksi batu bara belakangan ini telah diputarbalikkan. Alih-alih mengurangi jumlah produksi batu bara menjadi 413 juta ton pada tahun 2017 sebagaimana direncanakan, produksi batu bara malah naik menjadi 477 juta ton. Coalruption, atau korupsi batu bara telah dan sedang menghancurkan kesejahteraan Indonesia. Praktik ini mencemari lingkungan, mematikan, merusak reputasi dan melemahkan demokrasi Indonesia melalui praktik korupsi politik. Korupsi politik di sektor batu bara harus diakhiri dengan mengakhiri ketergantungan kepada komoditas tersebut untuk masa depan Indonesia yang lebih baik: energi dan politik yang bersih.

**Rekomendasi aksi**

Terdapat beberapa langkah yang harus diambil untuk mengatasi korupsi politik dalam bisnis pertambangan batu bara:

- Memperkuat penegakan hukum dalam operasi pertambangan batu bara. Kelemahan yang ada saat ini adalah kehadiran PEP dalam kepemilikan dan kepemimpinan perusahaan batu bara.

- Memperkuat langkah-langkah hukum untuk mencegah konflik kepentingan di antara PEP, termasuk menciptakan perlindungan yang lebih kuat dari risiko kolusi dan campur tangan politik yang ditimbulkan oleh “fenomena keluar masuk” di mana orang seringkali berpindah jabatan antara sektor publik dan swasta.

- Menyoroti pemilik manfaat dalam usaha pertambangan batu bara. Jika pemilik perusahaan yang sebenarnya tersamar, publik tidak mungkin dapat mengetahui siapa yang mengendalikan perusahaan tersebut.

- Menyusun peta jalan untuk menutup bisnis pertambangan batu bara di Indonesia. Dampak terhadap lingkungan dan komunitas, pembangunan yang tidak berkelanjutan, dan konflik sosial yang timbul akibat pertambangan batu bara sangat luas dan tidak dapat dihindari. Sebuah peta jalan harus dibuat untuk melakukan transisi energi dari batu bara ke energi bersih dan terbarukan.

# 01. Pendahuluan – Mengisi kesenjangan
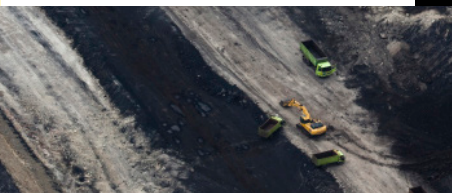
***"Sungai Nangka yang dari tahun 1970 dimanfaatkan kami untuk mencari ikan, mandi, minum ternak, dan memasak sudah tidak bisa digunakan. Tak ada lagi berbagai jenis ikan yang bisa didapatkan warga dengan menjala atau memancing. Air keruh dan berlumpur. Untuk minum ternak pun warga tidak berani menggunakan air sungai"*** *(Rukka, Ketua Kelompok Tani Maju Bersama, RT 6, Sungai Nangka, Kelurahan Teluk Dalam, Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur tentang dampak air lubang bekas tambang batu bara PT Kutai Energi yang dibuang langsung ke sungai)*

## 1.1 Latar Belakang

Kalimantan Timur merupakan pusat industri batu bara di Indonesia. Terdapat ribuan tambang terbuka di wilayah ini dan kebanyakan merupakan pertambangan ilegal. Tambang-tambang baru terus dibuka, sementara yang lama ditelantarkan begitu cadangan batu bara telah habis. Pertambangan baru seringkali menyebabkan kerusakan hutan hujan dan pengelolaan tambang menyebabkan polusi udara dan air. Kerusakan lingkungan tidak berakhir saat tambang ditelantarkan karena tambang yang telah ditelantarkan tersebut terbukti berbahaya, bahkan mematikan bagi komunitas sekitar.

Menurut hukum Indonesia, perusahaan tambang wajib mengisi lubang-lubang tambang yang tidak digunakan, serta menghijaukan dan merestorasi lingkungan pertambangan. Tiap tahapan proses tersebut harus mendapatkan persetujuan dari badan pemerintah sebagai bagian dari pendaftaran awal untuk izin pertambangan. Perusahaan juga diharuskan melakukan analisis dampak lingkungan (amdal) dan memberikan surat jaminan keuangan untuk reklamasi dan restorasi situs pertambangan. Namun, banyak perusahaan yang melanggar peraturan-peraturan tersebut. Hal ini terus belanjut secara luas di seluruh wilayah pertambangan di Indonesia, termasuk di Kalimantan Timur, provinsi yang kaya dengan batu bara.

**Bagaimana pengelola pertambangan batu bara mengingkari tanggung jawabnya**

Pada bulan Desember 2015, Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur menyatakan bahwa terdapat 856 pemegang izin pertambangan komersial. Dari jumlah itu, hanya 338 memiliki surat jaminan reklamasi.[1] Selain itu, hanya 96 dari 856 pemegang izin telah membayar uang muka jaminan pascapenambangan untuk restorasi situs pertambangan.[2] Berbeda dengan dana reklamasi, uang muka

[1] Apriando, T. 2017. Who owns Indonesia's deadly abandoned coalmines? (Siapa yang memiliki tambang-tambang batubara terlantar yang mematikan di Indonesia?) *Mongabay*. 25th May 2017 https://news.mongabay.com/2017/05/who-owns-indonesias-deadly-abandoned-coal-mines/

[2] *Ibid*

01.

restorasi tidak harus dibayar di muka, namun harus dibayarkan dua tahun sebelum surat izin tersebut kadaluwarsa

Akibatnya, perusahaan tambang gagal merestorasi ratusan tambang terbuka yang ditelantarkan, dan kini telah merusak lingkungan di Kalimantan Timur dengan dampak yang mematikan. Komnas HAM menemukan bahwa tambang-tambang tersebut ditelantarkan oleh 17 perusahaan di Kalimantan Timur dan telah menelan korban 27 orang antara tahun 2011 dan 2016, kebanyakan adalah anak-anak dan remaja.[3] Hingga bulan Desember 2018, jumlah korban yang ditelan oleh lubang tambang batu bara mencapai 31 orang.[4] Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kalimantan Timur menyatakan bahwa berdasarkan laporan dari 81 perusahaan, terdapat 314 bekas tambang yang telah ditelantarkan hingga bulan Desember 2016.[5] Namun, sebuah survei yang dilakukan oleh Dinas ESDM dengan citra Landsat menunjukkan bahwa terdapat dua kali lipat jumlah tambang yang dilaporkan, di mana terdapat 632 tambang batu bara yang telah berubah menjadi genangan air raksasa. 264 bekas tambang ini (42%) berlokasi di Kutai Kartanegara.[6]

Hingga saat ini, belum ada satupun perusahaan pertambangan yang didakwa karena kematian yang disebabkan oleh lubang tambang atau karena kegagalan dalam merestorasi lubang tambang.

**Bagaimana korupsi menyebabkan impunitas**

Impunitas, atau pembebasan dari tuntutan hukum, yang dimiliki oleh perusahaan pertambangan terjadi karena korupsi yang terjadi di sektor pertambangan. Lembaga anti-korupsi Transparency International menyatakan dalam laporannya *Bribe Payers Survey* [7] pada tahun 2011 bahwa sektor minyak dan gas dan pertambangan merupakan sektor-sektor yang rentan terhadap penyuapan. Nilai investasi pertambangan yang tinggi serta keterlibatan pemerintah yang besar

[3] *Ibid*
[4] Yovanda. 2018. Korban di Lubang Tambang Batubara Terus Bertambah, Sampai Kapan? *Mongabay*. 8th November 2018. http://www.mongabay.co.id/2018/11/08/korban-di-lubang-tambang-batubara-terus-bertambah-sampai-kapan/
[5] *Op.Cit.* Apriando, T. 2017
[6] *Ibid*
[7] https://transparency-france.org/wp-content/uploads/2016/04/2011_BPI_EN.pdf

lewat berbagai peraturan membuka peluang dan insentif untuk korupsi yang besar. Laporan OECD tahun 2016 berjudul Laporan mengenai Korupsi dalam Rantai Nilai Ekstraktif *(Report on Corruption in the Extractive Value Chain)* menekankan bahwa risiko korupsi dapat timbul pada berbagai titik di rantai pasokan: mulai dari fase pengambilan keputusan untuk melakukan ekstraksi hingga penggunaan penerimaan. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa sebagian besar kasus korupsi dalam industri ekstraktif yang disurvei terdapat dalam "penerbitan izin pertambangan, minyak dan gas", dan fase "operasi dan peraturan ekstraksi" (34 dari 59 kasus), sementara kasus-kasus lainnya terdapat dalam fase "pengumpulan penghasilan". Jenis-jenis pelanggaran yang terjadi termasuk penyuapan pejabat pemerintah, penggelapan uang, penyalahgunaan dan pengalihan dana publik, penyalahgunaan jabatan, pertukaran pengaruh, favoritisme, pemerasan, penyuapan pejabat domestik, dan uang pelicin.

Sektor pertambangan di Indonesia, khususnya pertambangan batu bara, juga tersentuh oleh korupsi. Laode Muhamad Syarif, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menyatakan bahwa proses penerbitan izin usaha pertambangan di tingkat lokal penuh dengan penyuapan dan *kickback*.

Korupsi telah mendorong kenaikan jumlah penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) hingga 13 kali sejak tahun 2001, dan hampir setengahnya adalah untuk pertambangan batu bara.[8] Proses desentralisasi pemerintahan sejak tahun 2001 telah meningkatkan jumlah kasus korupsi karena pemerintah kabupaten dan provinsi memiliki kekuasaan yang lebih besar atas pengelolaan sumber daya alam di wilayah mereka. Sebagai contoh, ekspor batu bara ilegal naik menjai 90 juta ton dengan nilai sekitar US $5 miliar (setara dengan Rp 58 triliun) tiap tahunnya.[9] Korupsi juga berarti banyak pemegang IUP yang menghindari pembayaran biaya-biaya terkait, pajak dan royalti, termasuk biaya asuransi reklamasi, asuransi pascapenambangan, jaminan ganti rugi, dan asuransi lingkungan.

### Bagaimana desentralisasi mendorong korupsi

Pengembalian yang cepat terhadap investasi, nilai keuntungan yang tinggi, dan subsidi yang besar telah menarik *politically exposed persons* (PEP)[10] ke dalam sektor batu bara. Kekuasaan diskresioner di tingkat pemerintah daerah telah membuka peluang bagi politisi untuk memanfaatkan posisi mereka. Perkembangan yang paling signifikan dalam mendorong korupsi di sektor pertambangan adalah desentralisasi fungsi-fungsi pemerintah.[11] Desentralisasi telah membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih politis dan meningkatkan kekuasaan diskresioner para pejabat daerah, dan kedua hal ini meningkatkan risiko terjadinya korupsi.

---

[8] Kumparan. 2017. KPK Beberkan Kekacauan Pertambangan Batu Bara. 8 Juni 2017. *Kumparan.* <https://kumparan.com/muhamad-rizki/kpk-beberkan-kekacauan-pertambangan-batu-bara>

[9] Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA). 2015. *Indonesia Illegal Coal-Trafficking Epidemic requires an Impartial Inquiry* (Epdemik Trafficking Batubara Ilegal di Indonesia membutuhkan penyelidikan tak berpihak). Juni 2015. http://ieefa.org/indonesias-coal-trafficking-epidemic-requires-an-impartial-inquiry

[10] Lihat bagian 3.1

[11] Macdonald, K.F. 2017. *The Risk Assessment of Corruption in the Awarding of Mining Permits* (Kajian Risiko Korupsi dalam Menerbitkan Izin Usaha Pertambangan). Transparency International Indonesia. Jakarta.

Sebelum tahun 1999, peraturan pertambangan dijalankan secara terpusat. UU Nomor 22/1999 dan UU Nomor 32/2004 mendelegasikan kewenangan tersebut ke pemerintah daerah, termasuk pengelolaan izin pertambangan.[12] Dua buah reformasi selanjutnya memberikan kemampuan bagi pemerintah daerah untuk menaikkan pendapatan daerah dengan memberlakukan jenis pajak baru dan menerbitkan izin pertambangan dan ekspor baru.[13] Dalam periode ini, jumlah perizinan naik dari 750 pada tahun 2001 hingga lebih dari 10.000 pada tahun 2010, 40% di antaranya adalah untuk pertambangan batu bara.

Desentralisasi juga memampukan politisi daerah mengeksploitasi sektor tersebut untuk membiayai kampanye pilkada. Pemilihan langsung untuk kepala daerah di tingkat kabupaten dan provinsi di Indonesia dilakukan untuk pertama kalinya pada tahun 2007 dan pilkada terakhir diadakan pada tahun 2018.

**Korupsi dan politik Indonesia**

Meskipun pemilu langsung telah mendorong demokrasi di Indonesia, pelaksanaan kampanye pemilu tidaklah murah bagi para kandidat. Subsidi pemerintah untuk partai politik terbatas, sehingga uang dari kegiatan-kegiatan pertambangan batu bara kecil menjadi sumber yang penting untuk pendanaan politik para kandidat. Seorang pejabat inkumben dari parpol yang berkuasa dapat mengumpulkan dana untuk kampanyenya dengan memulai usaha pertambangan batu bara atau menerbitkan izin usaha pertambangan batu bara. Para kandidat atau parpol dapat mengumpulkan dana kampanye dari perusahaan-perusahaan dengan imbalan perlakukan khusus, termasuk menerbitkan izin usaha pertambangan. KPK dan lembaga-lembaga masyarakat sipil telah melaporkan peningkatan mendadak dalam jumlah izin yang dikeluarkan dalam masa-masa pilkada atau setelah pilkada.[14] Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia juga menemukan hubungan antara korupsi politik dan penerbitan izin pertambangan.[15]

---

[12] UU no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang memindahkan kewenangan untuk mengeluarkan izin pertambangan dari pemerintah kabupaten ke pemerintah provinsi diharapkan dapat memperbaiki proses pemberian izin pertambangan serta pengawasannya. Namun, pelaksanaan UU ini pada tahun 2016 belum menghasilkan perbaikan dalam pengelolaan izin usaha pertambangan.

[13] *Devi et al;* Gandataruna *et al* dalam *Op.Cit.* Macdonald, K.F. 2017

[14] Nahar; Satu dalam *Op.Cit.* Macdonald, K.F. 2017

[15] Ansori; Yuntho dalam *Op.Cit.* Macdonald, K.F. 2017.

Di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, mantan bupati Rita Widyasari menerbitkan 254 izin usaha pertambangan batu bara dan mendapatkan julukan "ratu batu bara" dari media lokal.[16] Pada bulan Juni 2017, terdapat 625 pemegang izin usaha pertambangan di kabupaten tersebut, dibandingkan 1.404 pemegang izin di seluruh Provinsi Kaltim.[17] Widyasari sedang menyelesaikan masa jabatan yang kedua dan sedang menyiapkan kampanye untuk menjadi Gubernur Kalimantan Timur pada tahun 2018 ketika dia ditetapkan menjadi tersangka korupsi oleh KPK dan kemudian ditahan dan divonis bersalah

Naiknya jumlah izin yang diterbitkan pada saat pilkada merupakan hal yang biasa di Kaltim, dan Widyasari bukan satu-satunya pejabat yang terlibat kasus korupsi. Achmad Amins, gubernur Samarinda dua periode tahun 2000-2010, memperluas pertambangan batu bara dengan menerbitkan 63 izin antara tahun 2007-2008 tanpa melakukan Amdal yang sesuai dalam masa kampanyenya untuk menjadi gubernur tahun 2009.[18] Sebagaimana diobservasi oleh JATAM (Jaringan Advokasi Tambang), pilkada telah mendorong pertumbuhan pertambangan batu bara di Kaltim secara eksponensial. Studi yang dilakukan oleh JATAM di lima kabupaten (Kutai Barat, Kutai Timur, Bulungan, Berau, dan Paser Penajam Utara) menunjukkan bahwa jumlah izin pertambangan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah mengalami kenaikan tajam sebelum pilkada.[19]

## 1.2 Tujuan Laporan

Meskipun telah ada kesadaran publik mengenai luasnya korupsi di sektor pertambangan batu bara, tidak banyak laporan yang mampu memberikan analisa yang sistematis dan mendalam. Laporan-laporan yang pernah diterbitkan tentang pertambangan batu bara sebagian besar berfokus pada dampak negatif batu bara, seperti yang dilaporkan oleh Harrington (2017), Waterkeeper' Aliance dan Jatam (2017), Greenpeace (2014) dan Jorde (2013) serta sumber-sumber pendanaan pertambangan, seperti Jorde (2013) dan Scrivener dan Lund-Harket (2013). Laporan Transparency International Indonesia membantu menyoroti risiko-risiko korupsi untuk menghindari penerbitan izin yang sah, taat hukum dan etis di sektor pertambangan di Indonesia, namun tidak secara khusus berfokus pada sektor batu bara ataupun menyoroti kasus korupsi dalam pertambangan batu bara secara spesifik.[20] Laporan *Publish What You Pay* (PWYP) pada tahun 2017 memberikan ikhtisar perjalanan reformasi tata kelola pertambangan batu bara oleh KPK dari tahun 2014-2017 tanpa menambahkan bukti-bukti baru mengenai korupsi di sektor pertambangan.[21] Kurangnya informasi yang komprehensif dan tersedia secara luas mengenai korupsi dalam sektor pertambangan sejalan dengan kecilnya jumlah kasus korupsi yang ditindak secara hukum. Hingga saat ini, KPK baru menyelidiki tiga kasus korupsi di sektor pertambangan yang melibatkan pejabat pemerintah.[22]

[16] Jong, H.N. 2017. *Queen of coal named corruption suspect in Indonesia* (Ratu batubara ditetapkan sebagai tersangka korupsi di Indonesia). Mongabay. 5th October 2017. https://news.mongabay.com/2017/10/queen-of-coal-named-corruption-suspect-in-indonesia/

[17] Ghofar, M. 2017. Kutai Kartanegara miliki izin pertambangan terbanyak. Antara. 6th June 2017. <https://kaltim.antaranews.com/berita/38664/kutai-kartanegara-miliki-izin-pertambangan-terbanyak>

[18] Hardjanto, Y.S. and Rahmad, R. 2014. Fokus liputan: Bencana tambang di Samarinda. *Mongabay*. 31st August 2014. <www.mongabay.co.id/2014/08/31/fokus-liputan-bencana-tambang-di-samarinda/>

[19] Hidayat, F. 2013. Izin tambang di Kalimantan Timur terus bertambah. 28th May 2013. <https://nasional.tempo.co/read/483967/izin-tambang-di-kalimantan-timur-terus-bertambah>

[20] *Op.Cit.* Macdonald, K.F. 2017

[21] Abdullah, M (Ed). 2017. *Administration of Coal Permit under Coordination and Supervision of KPK* (Pengelolaan Izin Pertambangan di bawah Koordinasi dan Pengawasan KPK). Publish What You Pay Indonesia dan KPK. Jakarta.

[22] Wawancara dengan Dian Patria, KPK, tanggal 16 Oktober, 2017. Lihat Kahfi, K. 2017. *KPK names former regent suspect; estimated state losses Rp 2.7t* (KPK mengumumkan mantan bupati sebagai tersangka; perkiraan jumlah kerugian negara Rp 2,7 triliun). The Jakarta Post. 3 October 2017 <www.thejakartapost.com/news/2017/10/03/kpk-names-former-regent-suspect-estimated-state-losses-rp-2-7t.html,www.thejakartapost.com/news/2017/07/06 /southeast-sulawesi-governor-detained-for-bribery.html>, dan Halim, H. 2015. *Ex-PDI-P lawmaker gets 'lenient' sentence for bribery* (Mantan politisi PDI-P mendapatkan vonis 'ringan' untuk kasus penyuapan). The Jakarta Post. 24 November 2015 <http://www.thejakartapost.com/news/2015/11/24/ex-pdi-p-lawmaker-gets-lenient-sentence-bribery.html> untuk informasi latar belakang terkait kasus ini.

Laporan ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan antara kesadaran umum terkait korupsi dan kasus-kasus aktual di sektor pertambangan batu bara. Laporan ini berfokus pada pentingnya faktor-faktor seperti kesenjangan dalam sistem hukum, kekuasaan diskresioner dan politisasi proses pengambilan keputusan, tata kelola yang buruk dalam sektor pertambangan, dan ketidakjelasan dalam kepemilikan perusahaan penerima manfaat atau *beneficial ownership.*

Korupsi politik dalam pertambangan tidak hanya berakibat pada misalokasi sumber daya, namun juga mempengaruhi proses pengambilan keputusan. Hal ini melibatkan kedekatan antar perusahaan, birokrat, dan politisi untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Kasus PT Toba Sejahtra, yang disoroti dalam laporan ini, memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai jenis praktik-praktik korupsi dalam sektor pertambangan batu bara, para pihak yang terlibat, dan dampak-dampaknya.

Laporan ini berupaya untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai kompleksitas korupsi dalam sektor ini, yang berfokus pada kolusi sistematis antara perusahaan dan pemerintah, serta memberikan dasar yang kuat untuk mengembangkan inisiatif-inisiatif anti-korupsi secara strategis di Indonesia dan beralih dari batu bara ke energi terbarukan.

# 02. Kerangka Konteks – Membongkar Korupsi di Sektor Pertambangan

*"Jangan biarkan korupsi menjadi bagian dari kebudayaan Indonesia"* *(Mohammad Hatta, proklamator kemerdekaan Indonesia)*

## 2.1 Korupsi dalam relasi antara negara dan masyarakat

Secara umum, korupsi dipahami sebagai "penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi", yang mengacu pada perilaku sesorang yang mewakili negara dan kewenangan umum yang mencari keuntungan pribadi; atau penyalahgunaan barang publik oleh pejabat negara untuk kepentingan pribadi (Bank Dunia dalam Amundsen 1999).[23] Korupsi menciptakan pertentangan antara anggota masyarakat dengan negara, yang diwakili oleh pegawai negeri sipil, politisi atau siapapun yang berwenang untuk mengalokasikan sumber daya publik (yang seringkali bersifat langka) untuk kepentingan negara.[24] Korupsi terjadi ketika orang-orang tersebut *"menyalahgunakan kekuasaan publik yang mereka miliki untuk keuntungan pribadi dengan menerima uang atau suatu bentuk penghargaan lainnya, dan kemudian menyalahgunakan kekuasaannya untuk memberikan keuntungan yang tidak semestinya"* (Amundsen 1999).

Keterlibatan perwakilan negara dalam praktik-praktik korupsi seringkali terjadi dalam bentuk korupsi politik, di mana para pengambil keputusan politis secara sistematis menyalahgunakan, mengelak, mengabaikan ataupun membuat undang-undang dan peraturan yang sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Hal ini seringkali terjadi di tingkatan tertingi di dalam sistem politik.

### Korupsi di sektor pertambangan

Ada beberapa alasan mengapa sektor pertambangan secara khusus rentan terhadap korupsi politik, di antaranya adalah pengeluaran modal yang besar, keterlibatan peraturan pemerintah yang besar, komoditas yang bernilai tinggi, jumlah royalti dan pajak yang besar, tempat pengoperasian yang terpencil; dan

[23] Amundsen, I. 1999. Political Corruption: An Introduction to the Issues. *Chr. Michelsen Institute.* Bergen.

[24] Korupsi juga terjadi di dalam dan di antara perusahaan, dalam lembaga non-pemerintah, dan antara individu dalam urusan pribadi mereka, tanpa keterlibatan badan pemerintah atau pejabat pemerintah. Juga terdapat korupsi dalam bentuk menyuap, penipuan dalam dan antara perusahaan, individu dan pegawai dalam perusahaan. Korupsi semacam ini bahkan berdampak dalam sistem politik, karena dapat merusak moral publik jika tidak ada penyelesaian yang efektif. Namun, kebanyakan definisi korupsi tidak mencakup korupsi antar-masyarakat, dan cenderung menekankan korupsi sebagai hubungan antara negara dan masyarakat. Lihat Amundsen, I. 1999. *Political Corruption: An Introduction to the Issues. Chr. Michelsen Institute Development Studies and Human Rights.* Bergen, Norway.

ketergantungan pada komunitas lokal.[25] Perizinan dan persetujuan pemerintah harus didapatkan dari pejabat pemerintah untuk kegiatan eksplorasi, pengembangan, konstruksi dan pengoperasian pertambangan. Biasanya, infrastruktur yang diperlukan (seperti pelabuhan dan jalur kereta) juga dimiliki oleh pemerintah, yang berarti bahwa perusahaan dan agen-agennya selalu berurusan dengan pemerintah untuk menyalurkan produk mereka ke pasar. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk melakukan kajian dampak lingkungan dan sosial, merencanakan pembangunan lokal dan daerah, menegakkan standar-standar kesehatan dan keselamatan, serta berinvestasi dalam dan mendistribusikan pemasukan dari sektor mineral/ pertambangan. Akibatnya, pejabat pemerintah yang memiliki kekuasaan untuk dapat memblokir, menunda atau menggagalkan suatu proyek dapat juga berupaya untuk mencari suap sebagai imbalan dari penggunaan kekuasaan.

Dengan menggunakan berbagai studi kasus, laporan OECD tahun 2016 yang berjudul *"Corruption in the Extractive Value Chain: Typology of Risks, Mitigation Measures, and Incentives"* (Korupsi dalam Rantai Nilai Ekstraktif: Tipologi Risiko, Langkah-langkah Mitigasi dan Insentif), menunjukkan bahwa risiko korupsi dapat terjadi di berbagai titik dalam rantai nilai. Laporan tersebut juga menyoroti korupsi berskala besar, yang melibatkan pejabat tinggi pemerintah, dalam menerbitkan perizinan pertambangan dan migas, pengadaan barang dan jasa, perdagangan komoditas, pengelolaan pemasukan lewat dana sumber daya alam, serta belanja umum. Praktik korupsi ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, walaupun mekanisme yang paling sering digunakan adalah "pertukaran pengaruh, korupsi atau campur tangan politik dan korupsi peraturan" untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan dengan menghindari atau mengabaikan peraturan hukum.

**Pertukaran pengaruh (trading in influence)** adalah "proses atau tindakan di mana seseorang yang memiliki pengaruh yang riil atau nyata terhadap proses pengambilan keputusan atau pejabat publik menukarkan pengaruh tersebut untuk keuntungan yang tidak pantas/semestinya".

**Korupsi politik atau campur tangan politik (political capture** or **interference)** mengacu pada "kepentingan pribadi yang secara signifikan mempengaruhi proses pengambilan keputusan pejabat publik untuk keuntungan mereka sendiri, seperti mendapatkan harga royalti yang menguntungkan yang melanggar undang-undang, atau mendapatkan persetujuan izin, bahkan yang melanggar undang-undang negara, atau untuk mendapatkan akses terhadap informasi komersial yang sensitif".

Hampir sama dengan korupsi politik, **korupsi peraturan (regulatory capture)** terjadi "ketika suatu badan regulator yang didirikan untuk melayani kepentingan umum memajukan kepentingan kelompok-kelompok yang mendominasi industri atau sektor yang seharusnya diatur oleh badan tersebut". Korupsi dapat dilakukan untuk mempengaruhi desain atau penegakan peraturan tersebut. Korupsi yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan adalah bentuk korupsi yang dimaksudkan untuk melanggar atau mengabaikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Terdapat beberapa faktor yang meningkatkan risiko korupsi dalam tiap tahapan proses pertambangan. Kelemahan dalam sistem anti-korupsi, legal dan yudisial dapat melemahkan kemampuan pemerintah untuk dapat mendeteksi, mencegah, dan menghukum korupsi secara efektif. Bukti empiris menunjukkan bahwa proses pengambilan keputusan yang sangat terpolitisasi dan kekuasaan diskresioner yang dipegang oleh pejabat negara tinggi maupun pejabat di bawahnya juga merupakan faktor-faktor risiko lainnya. Hal ini dapat terjadi karena standar-standar yang sangat rendah terkait konflik kepentingan, lemahnya peraturan mengenai lobi dan pendanaan kampanye politik, serta kurangnya transparansi keuangan negara. Secara khusus, mungkin juga tidak ada perlindungan yang cukup dari risiko kolusi dan campur tangan politik yang berkaitan dengan "fenomena keluar masuk pintu", dimana orang dapat berpindah dari satu jabatan tinggi ke jabatan lainnya di sektor pemerintah dan swasta. Tata kelola yang lemah dalam sektor in juga merupakan faktor risiko lainnya.

[25] Ernst & Young. 2010. *Fraud and corruption in mining and metals: Focus on business ethics. Ernst & Young.* London.

Tata kelola dalam sektor pertambangan seringkali tidak memiliki pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas. Badan usaha milik negara -sebagai bagian dari sektor swasta- dapat bertindak juga sebagai administrator dan pengatur sektor ini.

Pola-pola korupsi yang makin kompleks juga menjadikannya sulit untuk diberantas. Korupsi dapat berkedok di balik struktur yang berlapis-lapis di berbagai tingkatan yang melibatkan perusahaan tempurung (*shell company*) dan kendaraan perusahaan yang digunakan untuk menyalurkan atau menyembunyikan pembayaran korupsi dan menjauhkan pelaku korupsi dari tindakan kriminal tersebut. Kurangnya akses terhadap informasi yang memadai mengenai struktur-struktur perusahaan tersebut, termasuk informasi mengenai kepemilikan perusahaan, merupakan salah satu risiko korupsi terbesar.

*Gambar 1.*
*Rantai nilai industri ekstraktif/pertambangan. Korupsi dapat terjadi di setiap tahapan rantai ini.*
***Sumber:** Resource Governance Institute dalam OECD (2016)*

### 2.2 Menelaah risiko korupsi di Indonesia

Di Indonesia, risiko-risiko korupsi di atas sangat nyata dan memiliki dampak yang signifkan. Laporan terakhir dari Transparency International Indonesia mengkaji 35 jenis risiko korupsi. Laporan tersebut menemukan bahwa 86% dari risiko-risiko tersebut sangat mungkin terjadi dan/atau akan berdampak sangat parah.[26] Sebagian besar risiko sangat tinggi berkaitan dengan cara izin pertambangan diberikan, serta bagaimana lokasi tambang ditentukan. Risiko korupsi terbesar berasal dari kerentanan dalam proses pemberian izin (54%), kemudian risiko yang berkaitan dengan praktik-praktik dalam proses pemberian izin (20%). Hal ini mengindikasikan bahwa sektor pertambangan cendurung rentan terhadap korupsi politik ketimbang korupsi birokratis.

Risiko korupsi politik ini menjadi lebih besar karena penyamaran kepemilikan keuntungan (*beneficial ownership*) di Indonesia. Ketika pemilik badan usaha yang sebenarnya tidak diketahui, masyarakat tidak mengetahui siapa yang mengendalikan pengambilan keputusan perusahaan. Undang-undang yang berlaku kini hanya mengharuskan bahwa perusahaan pertambangan menyebutkan pemilik legal sebagaimana terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM.

---

[26] *Op.Cit.* Macdonald, K.F. 2017

# 02.

## Siapakah pemilik sebenarnya?

Meskipun pasar pertambangan mungkin terlihat kompetitif dengan adanya banyak perusahaan, faktanya adalah hanya segelintir orang yang mengontrolnya. Menyembunyikan pemilik manfaat memungkinkan pemilik usaha untuk bertindak sebagai monopoli atau kartel dengan cara memiliki dan mengendalikan sejumlah perusahaan dengan nama atau bentuk usaha yang berbeda. Hal tersebut juga menjadikan usaha untuk mencegah konflik kepentingan menjadi lebih sulit. Proses *bidding* yang seharusnya dilakukan terbuka malah menguntungkan perusahaan-perusahaan di mana pejabat atau rekannya memiliki kepentingan dengan cara membatasi siapa yang dapat mengajukan tawaran.

Contoh lainnya adalah manipulasi kebijakan "kandungan lokal", dimana proses *bidding* mengharuskan adanya suatu konsorsium atau usaha bersama antara perusahaan asing dan perusahaan lokal (atau pengusaha lokal) atau BUMN. Persyaratan untuk membentuk usaha bersama dengan mitra lokal dapat digunakan untuk menguntungkan perusahaan yang dimiliki oleh, atau berhubungan dengan, pejabat negara untuk memenuhi kepentingan politisi.

Meskipun beberapa regulator di Indonesia bersikeras bahwa identitas pemilik keuntungan perusahaan harus diungkapkan, hal ini tidak menjadi hal yang wajib di setiap sektor.[27] Terdapat banyak isu dalam hal ini, termasuk definisi yang paling sesuai untuk kepemilikan keuntungan (*beneficial ownership*) dan pengumpulan informasi, dan juga terbukti sulit untuk mengembangkan sebuah database terkait pemilik keuntungan di Indonesia.[28] Kantor pencatatan vital, seperti sistem administrasi hukum, tidak mencatat pengungkapan nama pemilik keuntungan.

Saat ini, tidak ada peraturan yang secara jelas mewajibkan perusahaan dalam industri ekstraktif untuk mengungkapkan siapa nama pemilik keuntungan. Perusahan hanya diwajibkan untuk menyebutkan nama dewan direktur dan pemegang saham (pemilik legal). Peraturan terkait pertambangan migas (Perpu No. 35/2004) juga hanya mewajibkan adanya penjelasan apakah suatu perusahaan mengendalikan, atau dikendalikan oleh, perusahaan lainnya.

Sektor batu bara yang pada dasarnya membutuhkan hubungan yang dekat antara pihak swasta dan pemerintah besamaan dengan kerangka peraturan yang lemah di Indonesia menciptakan korupsi politik dan sistematik, di luar korupsi birokratis, dalam bentuk pertukaran pengaruh, *political capture* dan korupsi peraturan. Dengan peraturan pemilik keuntungan yang tidak transparan, sulit untuk mengidentifikasi konflik kepentingan yang melibatkan para pembuat keputusan kunci.

---

[27] Peraturan di dalam pasar keuangan dan sektor perbankan sudah mewajibkan adanya pengungkapan pemilik keuntungan. Sebagai contoh, Bank Indonesia (BI) dalam Peraturan BI No. 14/27/PBI/2012 mengatur kewajiban bagi bank untuk meminta informasi pemilik keuntungan suatu akun, maupun kewajiban untuk memiliki prosedur uji kelayakan konsumen. Otoritas Jasa Keuangan juga mengharuskan pengungkapan pemilik keuntungan dalam peraturannya POJK 22/POJK.04/2014, terkait prinsip mengenal nasbah dalam pasar modal. Lihat Pradiptyo, R., Wibisana, P.S., dan Hilman, M. 2017. *Final Report: A Roadmap of Beneficiary Ownership Transparency in the Extractive Industries in Indonesia. Coordinating Ministry of Economic Affairs*, Jakarta, Indonesia.

[28] Pradiptyo, R., Wibisana, P.S., dan Hilman, M. 2017. *Final Report: A Roadmap of Beneficiary Ownership Transparency in the Extractive Industries in Indonesia*. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Jakarta. Indonesia.

# 03. Korupsi dalam Pertambangan Batu bara – Permainan para Political Exposed Persons

***"Di Indonesia, sektor-sektor ekstraktif, energi dan infrastruktur merupakan permainan pemain besar. Agar berhasil, Anda harus mengenal siapa saja pemain-pemain itu, menjaga hubungan baik, serta menggunakan pengaruh mereka untuk membuat, menghambat ataupun melanggar peraturan demi kepentingan diri sendiri. Anda harus menjadikan mereka seperti anggota keluarga sendiri"*** *(La Ode Ida, Ombudsman Republik Indonesia)*

## 3.1 Permainan dalam Pertambangan

Sekalipun reaksi menentang korupsi, kolusi, dan nepotisme, bersamaan dengan krisis ekonomi yang parah, merupakan faktor-faktor pemicu reformasi tahun 1998, peran yang dimainkan oleh *"para pemain besar"* – atau *Politically Exposed Persons* (orang-orang yang berpengaruh secara politik) – terus terjadi dalam kasus-kasus korupsi di sektor ekstraktif.

*Politically Exposed Person* (PEP) adalah seseorang yang memegang atau pernah memegang peran publik (seperti kepala negara atau pemerintah, politisi senior, pejabat yudisial atau militer, pejabat eksekutif BUMN atau petinggi partai politik). PEP juga mencakup anggota keluarga, maupun kerabat dekat, sosial atau profesional.[29] Karena posisi yang dijabat oleh mereka, banyak PEP yang dapat menyalahgunakan atau mengabaikan peraturan, regulasi dan kebijakan. Pengawasan yang lemah dan kurangnya transparansi dalam *beneficial ownership* (lihat bagian di atas) memperbesar risiko korupsi ketika izin menggarap sumber daya alam diberikan kepada perusahaan.

"Segitiga penipuan" atau *fraud triangle*, menyebutkan ada tiga faktor yang terlibat ketika penipuan terjadi: motivasi, rasionalisasi, dan peluang.

Peluang terjadinya korupsi dalam sektor pertambangan sangat besar. Negara seperti Indonesia yang sangat bergantung pada batu bara – dan mendapat julukan *"dirty man of Asia"* – menciptakan kebijakan-kebijakan yang memastikan bahwa

---

[29] Perserikatan Bangsa-bangsa. 2004. *United Nations Convention against Corruption* (Konvensi Anti-Korupsi PBB). Perserikatan Bangsa-bangsa. New York.

usaha batu bara dapat terus berlanjut dan menghasilkan keuntungan. Pada awalnya, pemerintah berencana untuk mengurangi produksi batu bara menjadi 413 juta ton pada tahun 2017 dari 419 juta ton pada tahun 2016,[30] dan akhirnya berkurang menjadi 400 juta ton pada tahun 2019. Namun, produksi batu bara pada tahun 2017 mencapai 477 juta ton, jauh melebihi produksi pada tahun 2016 yang mencapai 434 juta ton.[31] Dalam lingkungan semacam ini, terdapat banyak peluang bagi PEP untuk memanfaatkan celah dalam proses kebijakan untuk melakukan penipuan dan korupsi.

**Kasus Aburizal Bakrie dan PT Bumi Resources**

Aburizal Bakrie – mantan Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, mantan Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat – merupakan seorang PEP di sektor pertambangan batu bara. Namanya marak diberitakan dalam media massa pada tahun 2001 ketika perusahaan miliknya, PT Bumi Resources, yang pada saat itu baru mulai berkecimpung dalam sektor minyak dan pertambangan selama tiga tahun, membeli 80% saham PT Arutmin Indonesia, yang merupakan penghasil batu bara terbesar keempat di Indonesia, dari BHP Billiton Australia.[32] Pada tahun 2003, PT Bumi Resources membeli PT Kaltim Prima Coal (KPC) dari Rio Tinto dan BP. KPC merupakan perusahaan penghasil batu bara terbesar di Indonesia, yang memiliki area konsesi pertambangan batu bara mencapai 90.000 hektar di Sangatta, kabupaten Kutai Timur, dengan produksi batu bara rata-rata sebesar 15 juta ton per tahun.[33]

Sebagai bagian dari Perjanijan Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B) dengan pemerintah Indonesia, PT KPC diwajibkan untuk menjual sahamnya ke perusahaan domestik. Namun, karena terjadi perebutan kekuasaan antara pemerintah pusat dan provinsi terkait siapa yang berhak mendapatkan kepemilikan, proses divestasi tersebut tertunda selama bertahun-tahun, sehingga Rio Tinto dan BP tidak dapat bergerak.[34] Saat Rio Tinto dan BP merasa frustrasi dengan proses ini, PT Bumi Resources memanfaatkan kesempatan tersebut dengan mengambil alih Sangatta Holdings Ltd. (SHL) dan Kalimantan Coal Ltd. (KCL) sebagai pemegang saham KPC, dengan harga yang sangat murah, yaitu 500 juta dollar AS, 40 persen lebih murah dari nilai yang sebenarnya.[35] *Vice President* BP di Indonesia, Nico Kanter, menyatakan bahwa harga itu memang rendah karena adanya perubahan situasi sejak nilai perusahaan itu dihitung pada tahun 2001, khususnya terkait harga batu bara. Namun, transaksi tersebut merugikan BP dan Rio Tinto dari perkiraan laba sebesar 1,2 miliar dollar AS, atau masing-masing 601,01 juta dollar AS, selama sepuluh tahun berikutnya.

---

[30] Anonim. 2017. Dirty man of Asia deepens addiction to coal. *Asia News Network.* 30 Desember 2017 http://www.nationmultimedia.com/detail/opinion/30335079

[31] *Ibid*

[32] Atmanto, I.A. 2003. Bumi sangata memilih Bumi. *Majalah Gatra, No. 37/IX,* 2nd August 2003 <arsip.gatra.com/2003-07-33/majalah/artikel.php?pil=23&id=32533 and http://www.bumiresources.com/index.php? option=com_ content&task=view&id=8&Itemid=14>

[33] Prasetyawan, W. 2005. Government and Multinationals: Conflict over Economic Resources in East Kalimantan, 1998-2003. *Southeast Asian Studies, Vol. 43, No. 2, September 2005.* Kyoto University, Kyoto.

[34] *Ibid*

[35] *Ibid*

Rio Tinto membela keputusan untuk menjual sahamnya dengan mengatakan bahwa transaksi tersebut dilakukan untuk memindahkan kepemilikan Sangatta Holdings Ltd, dan Kalimantan Coal Ltd sebagai perusahaan induk, dan bukan memindahkan kepemilikan KPC, sehingga Bumi harus melanjutkan proses divestasi dengan pemerintah.

Meskipun pemerintah provinsi mengajukan keluhan dan keberatan terkait transaksi tersebut, aksi Bumi tersebut diizinkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).[36] Nampaknya, Rio Tinto dan BP menjadi penjamin bagi Bumi agar Bumi dapat memperoleh dana dari kreditur internasional untuk pembelian kedua perusahaan tersebut. Bumi mendapatkan pinjaman sebesar 404 juta dollar AS dari United Overseas Bank di Singapura, 318 juta dollar AS dari Credit Suisse First Boston, 46 juta dollar AS dari Macquarie Bank Ltd. di Australia, dan 40 juta dollar AS dari Leighton Financial.[37]

Segera setelah reformasi 1998, tatanan politik di Indonesia berubah secara signifikan, di mana kekuasaan tersebar dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Sepertinya dengan berpihak dengan Aburizal Bakrie, BP dan Rio Tinto berharap mendapatkan perlindungan politik dalam dua bentuk.[38] Pertama, penjualan KPC dapat melindungi BP dan Rio Tinto dalam jangka pendek dari serangan-serangan Gubernur Kaltim serta aktor-aktor politik lainnya, yang berusaha menggunakan isu nasionalisme dan lokalisme untuk melawan kedua perusahaan itu. Kedua, kepentingan mereka di Indonesia dapat terlindungi secara politik dalam jangka panjang.

Pada saat itu, Aburizal sedang naik daun di dunia politik nasional, dengan karier bisnis yang mapan. Dia ditunjuk sebagai menteri koordinator dalam Kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode 2004-2009, lalu menjadi Ketua Umum Partai Golkar pada tahun 2009. Sebagai partai penguasa pada era Soeharto, Golkar dipersalahkan atas krisis ekonomi dan politik yang mengawali proses reformasi tahun 1998. Namun, dalam pemilu 1999, Golkar mampu menampilkan dirinya dengan wajah baru dan menjadi parpol terbesar kedua setelah Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P). Golkar lalu memenangkan pemilu tahun 2004, antara lain dengan memanfaatkan jaringan kantor-kantor cabang hingga tingkat kecamatan yang didirikan di era Soeharto.

**Kasus Churchill vs Nusantara**

Kasus perusahaan tambang Churchill menggambarkan luasnya pertukaran pengaruh dan korupsi politik dalam industri pertambangan batu bara. Kasus ini dimulai pada tahun 2008 saat Churchill, sebuah perusahaan tambang yang terdaftar di London, memperoleh bagian 75 persen dari empat izin yang diberikan kepada Ridlatama Group, sebuah perusahaan nasional. Churchill bekerja sama dengan perusahaan ini dalam pertambangan batu bara untuk diekspor ke India dan Cina.[39] Pada bulan Mei 2008, Churchill menyatakan bahwa mereka memiliki sumber daya batu bara termal "besar" – yaitu sebesar 2,73 miliar ton. Jumlah sebesar itu menjadikan area tersebut aset pertambangan batu bara terbesar ketujuh di dunia, dan berpotensi menghasilkan 700 juta hingga 1 miliar dollar AS tiap tahunnya selama 20 tahun.

Namun, ada satu masalah, yaitu perizinan Churchill mencakup daerah di Kabupaten Kutai Timur yang dulunya dikendalikan oleh sejumlah perusahaan yang berafiliasi dengan Nusantara Group, yakni sebuah konglomerasi perusahaan yang memiliki banyak koneksi politik, namun izin

[36] *Ibid*
[37] *Ibid*
[38] *Ibid*

[39] Schonhardt, S. 2012. British mining firm sues Indonesia for asset seizure. *The New York Times*. 6 Juni 2012. <www.nytimes.com/2012/06/07/business/global/british-mining-company-sues-indonesia-over-1-8-billion-coal-project.html>

pertambangannya telah kadaluwarsa. Salah satu pemegang saham besar Nusantara saat itu adalah Prabowo Subianto, pensiunan jenderal dan Ketua Partai Gerindra, yang juga adalah pendukung politik dan dan kolega Isran Noor, Mantan Bupati Kutai Timur dan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) saat ini.[40] Tidak lama setelah Churchill mengumumkan temuannya, Isran Noor mencabut kuasa pertambangan Churchill dan memperpanjang izin milik Nusantara.

Ketika Noor mencabut kuasa pertambangan milik Churchill-Ridlatama pada bulan Mei 2010, dia mengatakan bahwa perusahaan tersebut melakukan penebangan liar di kawasan hutan. Isran Noor lalu menuduh Churchill memalsukan dokumen-dokumen izin tambang dan izin usaha yang tumpang tindih dengan konsesi yang diberikan kepada Nusantara. Namun, Churchill bersikeras bahwa izin yang tumpang tindih tersebut sengaja dirancang sebagai bagian dari "perampasan aset bernilai tinggi".[41] Kedua perusahaan tersebut bersengketa di pengadilan hingga Mahkamah Agung. Kasus tersebut diwarnai oleh berbagai gugatan dan gugatan balik terkait penebangan liar dan keaslian dokumen kedua belah pihak, dan pada akhirnya, putusan MA mengalahkan Churchill pada bulan April 2012. Churchill kemudian mengajukan gugatan di arbitrasi internasional, yaitu sebuah sistem pengadilan paralel yang terbuka hanya bagi investor asing di Indonesia.

Churchill menuntut 2 miliar dollar AS untuk ganti rugi atas kehilangan perizinannya, namun pada akhirnya, mereka kalah ketika International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) Bank Dunia memutuskan bahwa gugatan Churchill didasarkan pada dokumen palsu.[42] Churchill juga diperintahkan untuk membayar kembali 75 persen dari 12,3 juta dollar AS kepada pemerintah Indonesia untuk biaya-biaya legal dan pengadilan.

Dokumen-dokumen palsu yang menyebabkan kekalahan Churchill dalam kasus ini meliputi periode 2007- 2010, dan juga meliputi periode ketika Churchill membeli 75 persen dari Ridlatama Group. Dokumen-dokumen tersebut juga termasuk perizinan eksplorasi, perizinan survei, analisa spasial dan surat-surat hukum dan kerjasama, semuanya -menurut mereka- ditandatangani oleh pejabat Kabupaten Kutai Timur atau Provinsi Kaltim. Menurut pendapat pengadilan internasional, mitra Churchill, Ridlatama, berupaya untuk membuktikan klaim terkait konsesi pertambangan itu dengan menggunakan dokumen palsu yang kemungkinan *"mendapatkan bantuan dari orang dalam yang memasukkan dokumen-dokumen tersebut ke basis data dan arsip Kabupaten Kutai Timur"*.[43] Menurut pengadilan, karena perbuatan mitra lokal Churchill maupun karena Churchill tidak memiliki izin yang sah, mereka tidak berhak menuntut ganti rugi untuk kerugian mereka terkait kasus pertambangan Kutai Timur.

Meskipun Isran Noor menegaskan bahwa hubungannya dengan Prabowo Subianto bukan alasan mengapa dia mencabut izin Churchill, Churchill sebaliknya yakin bahwa kasus tersebut melibatkan "permainan politik di tingkat daerah".[44]

Awang Faroek Ishak, mantan Bupati Kutai Timur dan mantan Gubernur Kaltim, menjelaskan situasinya sebagai *"salah satu kasus korupsi terbesar di negara ini"* saat memberikan kesaksiannya di pengadilan.[45] Berdasarkan transkrip pengadilan, Ishak mengatakan bahwa Isran Noor mungkin terlibat dalam kasus tersebut.

Kasus Churchill tersebut menunjukkan pentingnya koneksi politik dalam dunia bisnis di Indonesia dan bahwa koneksi tersebut dapat disalahgunakan. Mitra lokal Churchill, Ridiatama, mengeksploitasi hubungannya dengan pejabat pemerintah daerah untuk memalsukan dokumen-dokumen izin pertambangan. Namun, Nusantara Group terbukti memiliki koneksi politik yang lebih kuat, atau keakraban yang lebih kuat. Akibatnya, izin Churchill dicabut dan izin Nusantara diperpanjang.

---

[40] *Ibid*
[41] *Ibid*
[42] Esterman, I. 2016. Lessons from the 2 billion coal mining lawsuit against Indonesia. *Mongabay*. 20 Desember 2016 < https://news.mongabay.com/2016/12/lessons-from-the-2-billion-coal-mining-lawsuit-against-indonesia/>
[43] *Op.Cit.* Esterman, I. 2016
[44] *Op. Cit.* Schonhardt, S. 2012
[45] *Ibid*

**Kotak 1.**
**“Bisnis politik” di Indonesia**

Aliansi strategis antara para elite daerah dan nasional dengan PEP mendominasi dunia usaha dan politik di Indonesia. Proses desentralisasi telah memberikan kekuasaan kepada kepala daerah untuk menerbitkan berbagai izin usaha – mulai dari perubahan lahan menjadi pertambangan hingga izin perkebunan. Pertemanan dengan pemerintah daerah di wilayah yang kaya dengan sumber daya alam merupakan aset yang berharga bagi para elite politik dan bisnis di tingkat nasional. Di sisi yang lain, PEP lokal membutuhkan perlindungan politik untuk mengamankan dan melanggengkan praktik korupsi mereka agar dapat terus menghasilkan pemasukan dari sektor sumber daya alam, maupun dukungan politik jika berencana untuk naik ke tingkat politik yang lebih tinggi.

Kisah Gubernur Nur Alam menggambarkan hubungan saling menguntungkan yang terjadi. Sebagian dari keberhasilannya di Sulawesi Tenggara (Sultra) adalah karena kedekatannya dengan Hatta Rajasa, mantan Menteri Koordinator Perekonomian, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) dan calon wapres Prabowo. Sebelum memasuki dunia politik, Nur Alam dikenal sebagai pengusaha besar di Sulawesi dan memiliki perusahaan kontraktor PT. Tamalakindi Puri Perkasa. Pada tahun 2008, Nur Alam menyelenggarakan kampanye dengan dana yang besar untuk posisi gubernur dari PAN, yang berhasil mengalahkan calon dari Golkar dan inkumben, Ali Mazi. Pada saat itu, PAN belum begitu dikenal di Sultra. Dalam masa jabatannya selama enam tahun, hampir seluruh kepala daerah di Sultra di tingkat kabupaten berasal dari PAN, dan menjadikan Sulawesi Tenggara sebagai satu-satunya daerah yang dikuasai oleh PAN. Selama masa jabatan Hatta sebagai Menteri Perhubungan (2004-2007), perusahaan-perusahaan Nur Alam memenangkan kontrak untuk berbagai proyek infrastruktur di Indonesia, yang berkontribusi terhadap perluasan usahanya.

**Sumber:** Warburton (2014)
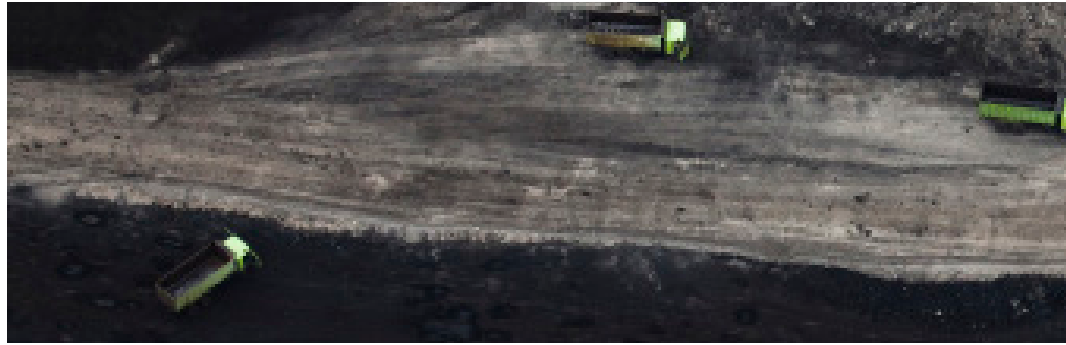
## 3.2 Sektor batu bara yang menggiurkan dan masuknya PEP

Sektor batu bara yang para pelakunya saling akrab dan dekat dengan ketergantungan yang besar pada peraturan pemerintah dan perizinan sangat terkait dengan politik dan pejabat politik. Alhasil, pertumbuhan dan tingkat keuntungan dari pertambangan batu bara sejak tahun 2000 sejalan dengan makin banyaknya PEP yang memasuki industri pertambangan batu bara. Dalam beberapa tahun, terdapat sejumlah kasus di mana perusahaan asing menjual sahamnya kepada perusahaan Indonesia yang memiliki koneksi politik.[46] Beberapa contohnya adalah:

- New Hope Mining dari Australia menjual sahamnya di Adaro kepada kelompok keluarga Rachmat/Soeryadjaya/Garibaldi pada tahun 2005 serta menyerahkan kuasa pengelolaan perusahaan Adaro kepada pemilik barunya;
- Perusahaan Samtan dari Korea Selatan menjual sebagian besar sahamnya kepada keluarga Sudwikatmono pada tahun 2004.
- Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Kemaritiman dalam kabinet Joko Widodo, mendirikan PT Toba Sejahtra group pada tahun 2004 dan berperan sebagai pemegang saham terbesar (99,9%) dalam bisnis yang mencakup empat perusahaan pertambangan batu bara sebagai anak perusahaan, di antaranya Toba Bara Sejahtra dan Kutai Energi yang memiliki beberapa konsesi di Kaltim.[47]

### Pertumbuhan sektor batu bara secara eksponensial di Indonesia

Industri batu bara di Indonesia telah mengalami transformasi, dari pemain kecil yang kurang dikenal di Asia menjadi negara pengekspor batu bara termal terbesar di dunia dalam jangka waktu kurang dari tiga dekade. Periode *take-off* terjadi antara tahun 1989 dan 1999, saat produksi batu bara bertumbuh dengan laju 30 persen dan mencapai 81 metrik ton (Mt) pada tahun 1999. Produksi batu bara berfokus di Kalimantan dibandingkan Sumatera karena lokasi yang dekat dengan pasar ekspor Asia Timur yang sangat menguntungkan (Jepang, Korea dan Taiwan), jaringan transportasi dan logistik yang lebih baik, dan kualitas batu bara Kalimantan yang lebih baik daripada batu bara Sumatera.

---

[46] Lucarelli, B. 2010. The History and Future of Indonesia's Coal Industry: Impact of Politics and Regulatory Framework on Industry Structure and Performance. Working Paper 93, Program on Energy and Sustainable Development, Stanford University, Serra Mall, Stanford.
[47] Firmansyah. M.R. 2017. Alasan Luhut jual 90% saham Toba Sejahtra. *Kumparan*. 9th October 2017. <https://kumparan.com/dewi-rachmat-k/alasan-luhut-jual-90-saham-toba-sejahtra#uivSAfKUfi0fxDSI.99>
[48] Cornot-Gandolphe, S. 2017. *Indonesia's Electricity Demand and the Coal Sector: Export or meet domestic demand?* Oxford Institute for Energy Studies, Oxford.

Pertumbuhan tersebut didorong oleh ekspor batu bara, yang mencapai 55Mt pada tahun 1999. Antara tahun 2000-2009, ketika para investor domestik, yang didukung oleh pemerintah, mendapatkan kepemilikan perusahaan-perusahaan penghasil batu bara terbesar di Indonesia, industri batu bara Indonesia terus bertumbuh sebesar 12 persen per tahun selama periode ini. Pada tahun 2005, Indonesia menjadi negara pengekspor batu bara termal terbesar, dengan jumlah ekspor sebesar 117 Mt.

Pada tahun 2008, ekspor Indonesia naik menjadi 198 Mt, melebihi ekspor batu bara termal Australia sebesar 115 Mt. Pertumbuhan pesat ini terus berlanjut yang didorong oleh permintaan dari Cina dan India.[48] Produksi batu bara Indonesia bertumbuh sebesar 68 persen dalam periode ini, dari 291 Mt pada tahun 2009 menjadi 490 Mt pada tahun 2013. Sebagian besar produksi ini dijual di pasar ekspor. Tingkat ekspor naik secara pesat dari 233 Mt menjadi 424 Mt, dimana Cina dan India membeli hampir 90 persen hasil produksi, sementara hanya 4 persen dialokasikan untuk konsumsi domestik.

Dalam waktu yang singkat, industri batu bara Indonesia menjadi pemain besar dalam pasar batu bara di Asia, dam merupakan separuh dari total impor batu bara termal di Asia.[49]

Meskipun pertumbuhan ini terjadi seakan-akan karena letak pertambangan murah yang berdekatan dengan pelabuhan dan lokasi geografis yang strategis, penelitian oleh Atwood *et al* (2017) menunjukkan bahwa pertumbuhan ini sebetulnya terjadi oleh karena adanya subsidi. Laporan tersebut mengidentifikasi 15 subsidi kepada industri batu bara Indonesia dalam bentuk pemindahan tanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung, pendapatan pemerintah yang hilang (*revenue foregone*), pengadaan barang dan jasa di bawah nilai pasar, dan dukungan pendapatan atau harga.[50] Di samping itu, laporan ini menghitung bahwa tujuh dari kebijakan itu bernilai sebesar Rp 12,4 triliun (946 juta dollar AS) pada tahun 2014, sementara pada tahun 2015, subsidi yang diberikan untuk produksi batu bara diperkirakan bernilai sebesar sekitar Rp 8,5 triliun (644 juta dollar AS).

[49] *Ibid*

[50] Attwood, C *et al.* 2017. *Financial Supports for Coal and Renewables in Indonesia; GSI Report.* The International Institute for Sustainable Development. Winnipeg, Manitoba.

**Kotak 2.**
**Beberapa tokoh PEP di balik batu bara**

Industri batu bara di Indonesia terdiri dari beberapa perusahaan besar dan banyak perusahaan konsesi kecil di Sumatera dan Kalimantan. Enam perusahaan pengahasil batu bara terbesar di Indonesia adalah Bumi Resources (Kaltim Prima Coal dan Arutmin Indonesia), Adaro Energy, Kideco Jaya Agung, ITM, Berau Coal dan Tambang Batu bara Bukit Asam, atau Bukit Asam. Keenam perusahaan ini menghasilkan lebih dari 50 persen produksi batu bara di Indonesia pada tahun 2015. Bagi perusahaan batu bara, melibatkan PEP di tingkat nasional maupun di tingkat daerah merupakan hal yang biasa. Jika diamati lebih mendalam, PEP dari berbagai latar belakang dapat terlibat dalam pengoperasian usaha pertambangan batu bara di Kaltim, seperti:

- **Sandiaga Salahudin Uno** (Adaro Energy, pemegang saham), - Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta (2017-2018), Calon Wakil Presiden Pemilihan Presiden 2019, Mantan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.
- **Raden Pardede** (Adaro Energy, Komisaris Independen) – Wakil Koordinator Tim Asistensi Menteri Keuangan RI (2000 -2004); Ketua Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Indonesia (2004-2005); staff khusus Menteri Koordinator Perekonomian (2004-2005); Wakil Direktur PT Perusahaan Pengelola Aset (2004-2008)
- **Theodore Permadi Rahmat** (Adaro Energy, Wakil Presiden Komisaris) – anggota Dewan Ekonomi Nasional (1999-2000)
- **Letnan Kolonel (Purn.) Palgunadi Tatit Setyawan** (Adaro Energy, Komisaris Independen) - Presiden Komisaris PT Jakarta Propertindo (2010-2013)
- **DR. H. Darmono, S.H., M.M** (Berau Coal, Komisaris) – Wakil Jaksa Agung RI (2009-2013); pelaksana tugas Jaksa Agung RI (2010)
- **Laksamana (Purn.) DR. Marsetio** (Berau Coal, Komisaris Independen) – mantan Kepala Staf Angkatan Laut RI (2012-2014)

**Sumber:** Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM (2018); Cornot-Gandolphe (2018)

# 04. Toba Sejahtra – Jenderal di Pusaran Korupsi Politik Kalimantan Timur

***"Korupsi politik yang terjadi dalam usaha pertambangan batu bara telah merusak lingkungan. Mereka yang melakukan tindakan korupsi hanya berupaya mencari kekuasaan dan uang, dan mengabaikan dampak lingkungan. Korupsi harus dipahami sebagai bukan sekedar penyuapan. Kebijakan publik yang secara politis mendorong dan menyebabkan kerusakan lingkungan, maupun yang menciptakan kerugian terhadap negara, juga merupakan bentuk korupsi"*** *(W. Riawan Tjandra, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta)*

### 4.1 Peta korupsi politik Kalimanan Timur: lanskap baru, struktur lama

Kalimantan Timur merupakan contoh korupsi politik dimana politisi nasional maupun lokal menyatukan bisnis dengan politik untuk memanfaatkan sumber daya alam yang kaya.

Pada tanggal 26 September 2017, KPK menetapkan Rita Widyasari, Bupati Kutai Kartanegara di Kaltim sebagai tersangka dugaan gratifikasi.[51] Ia diduga menerima suap sebesar Rp 6 miliar (US$ 442,000) dari Hari Susanto Gun, Direktur Utama PT Sawit Golden Prima, pada tahun 2010 untuk memuluskan pemberian izin lokasi perkebunan kelapa sawit.[52] KPK juga menahan Khairudin rekan Widyasari yang juga merupakan Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kutai Kartanegara. KPK berencana untuk memeriksa aset-aset pribadi Widyasari, yang naik sepuluh kali lipat mulai tahun 2011, satu tahun setelah menjadi bupati, hingga tahun 2015, ketika dia maju pilkada untuk period kedua serta mendeklarasikan total asetnya sebesar Rp 236,7 milyar. Pada tanggal 6 Juli 2018, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis Rita 10 tahun penjara untuk penerimaan suap dari berbagai proyek.[53]

---

[51] Andri, N. 2017. Kutai Kartanegara regent named bribery suspect. *The Jakarta Post.* 26 September 2017 <http://www.thejakartapost.com/news/2017/09/26/kutai-kartanegara-regent-named-bribery-suspect.html>

[52] Jong, H. N. 2017. 'Queen of Coal' named corruption suspect in Indonesia. Mongabay. *5 Oktober 2017.* <https://news.mongabay.com/2017/10/queen-of-coal-named-corruption-suspect-in-indonesia/>

[53] New Desk, 2018. Kutai Kartanegara regent sentenced to 10 years for graft, *The Jakarta Post*, 7 Juli 2018. <http://www.thejakartapost.com/news/2018/07/07/kutai-kartanegara-regent-sentenced-to-10-years-for-graft.html>

Rita Widyasari bukanlah PEP daerah pertama di Kaltim yang terlibat kasus korupsi. Syaukani Hasan Rais, ayah Widyasari dan mantan bupati Kutai Kartanegara selama dua periode, juga terbukti melakukan empat tindakan pindana korupsi yang merugikan negara sebesar Rp 120 miliar. Syaukani dinyatakan bersalah pada awal tahun 2008 dan divonis enam tahun penjara. Putusan tersebut bertahan saat banding dan vonis tetap dijalankan meskipun ia berupaya mengembalikan uang yang telah digelapkan.[54]

Selama pelaksanaan desentralisasi di Indonesia, kasus-kasus korupsi di Kaltim makin menarik perhatian publik, khususnya kasus korupsi yang melibatkan anggota DPRD, maupun kepala daerah dan wakil kepala daerah.[55] Meluasnya korupsi di Kaltim berkaitan dengan pengelolaan dan eksploitasi sumber daya alam, termasuk batu bara. Sebagian besar kasus yang terjadi melibatkan pejabat tinggi negara di birokasi dan parlemen. Motivasi utama dari tindakan korupsi adalah untuk membiayai kampanye pejabat (sebagaimana dijelaskan di atas), di mana kemudian para elite berada di bawah tekanan untuk membayar kembali utang politik kepada para pendukungnya.[56] Penyelewengan keuangan seringkali terjadi dalam bentuk penggelapan uang yang dialokasikan untuk proyek pemerintah, dimana pejabat mencari suap dari pengusaha. Dalam praktiknya, korupsi, kolusi dan nepotisme terjadi di setiap tahapan proyek: tahap penawaran, rekrutmen, promosi, penganggaran, dan pembuatan kebijakan.[57]

Korupsi sudah mandarah daging dalam kehidupan di Provinsi Katlim. Menurut KPK, Kaltim menduduki peringkat ke-9 dari 10 provinsi dengan kasus korupsi terbanyak pada tahun 2015, satu tingkat di atas Sumatra Selatan.[58] Akar-akar korupsi di provinsi ini sangat dalam dan dapat dilacak hingga era Soeharto, ketika lembaga-lembaga yang memfasilitasi korupsi diciptakan. Tatanan kelembagaan tersebut sangat berkaitan dengan militer dan partai politik mayoritas saat itu, yaitu Golkar.[59]

**Bagaimana politisi daerah menyatukan bisnis dan politik**

Peran militer dan Golkar terus berlanjut karena elite baru dan lama bersaing untuk memanfaatkan lembaga-lembaga pasca kekuasaan Soeharto untuk kepentingan mereka sendiri. Contohnya, mantan Gubernur Kaltim Suwarna Abdul Fatah merintis kariernya di militer hingga memasuki dunia politik sebagai wakil gubernur pada tahun 1994.[60] Pada tahun 1998, ia dipilih sebagai gubernur dengan dukungan politik dari militer dan kemudian dari Partai Golkar dan PDI-P.

---

[54] Evaquarta, R. 2008. Business and Political Actor Relationship in Indonesia's Local Autonomy Project: A Comparative Study on Batam City and Kutai Kartanegara Regency. *Paper to the 17th Biennial Conference of the Asian Studies Association of Australia in Melbourne 1-3 July 2008*. Department of Government & International Relations. The University of Sydney. Sydney

[55] Diah, A.M. 2017. *The Politics of Patronage in Intergovernmental Financial Transfer: The Role of Local Elites in East Kalimantan Province, Indonesia.* Dissertation. College of Arts and Education, Victoria University Melbourne, Australia

[56] Mynt dalam *Op. Cit.* Diah, A.M. 2017

[57] Farouk dan Oetomo dalam *Op. Cit.* Diah, A.M. 2017

[58] Indopress. 2016. Jawa Barat Provinsi Terkorup. *Indopress.* 23 November 2016 <https://www.indopress.id/article/nasional/jawa-barat-provinsi-terkorup-se-indonesia>

[59] Robison in Aspinall, E. dan van Klinken, G. 2011. The state and illegality in Indonesia. Dalam The state and illegality in Indonesia (eds E. Aspinall dan G. van Klinken), Bab 1, hal 1-28. KITLV Press, Leiden

[60] Prasetyawan *op. cit.*

Contoh kasus lainnya adalah Syaukani Hasan Rais di Kabupaten Kutai Kartanegara. Syaukani memulai kariernya sebagai guru dan birokrat lokal, namun kemudian mendominasi politik lokal sebagai ketua Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Golkar Kalimantan Timur. Dia memanfaatkan posisinya sebagai Ketua DPD Golkar Kaltim setelah jatuhnya Soeharto untuk menjadi anggota DPRD dan kemudian bupati. Dia juga menggunakan posisinya untuk membagikan proyek lewat penunjukan proyek infrastruktur dan izin usaha, yang melibatkan lembaga birokasi dan hukum, untuk menjaga kedekatan dengan mereka.[61] Karena Golkar masih mendominasi DPRD, Syaukani mampu memuluskan proses pembuatan kebijakan, khususnya dalam perencanaan anggaran dan pembangunan. Akibatnya, terjadi banyak penggelapan dana pembangunan daerah yang melibatkan berbagai pejabat di kabupaten, termasuk DPRD, dalam jaringan kolusi Syaukani.

Sektor pertambangan, yang merupakan penyumbang pendapatan terbesar di Kutai Kartanegara, adalah sasaran utama bagi Syaukani dan kroninya. Laporan tahunan terkait izin pertambangan yang diterbitkan antara tahun 2001 dan 2006 menunjukkan bahwa jumlah izin pertambangan yang diterbitkan naik secara dramatis sebelum pilkada pada bulan Juni 2005, yang diduga digunakan untuk mendanai kampanye Syaukani.[62]

Uang sebesar Rp 3,14 miliar yang didapatkan dari izin tambang batu bara pada tahun 2004 dan 2005 hanya bagian kecil dari keseluruhan cerita. Selain itu, ada pajak produksi bebesar $0,50 dollar AS yang dikenakan untuk tiap ton batu bara yang dihasilkan. Pada tahun 2006, produksi batu bara mencapai lebih dari 13 juta metrik ton, sehingga pajak tersebut seharusnya menghasilkan pendapatan sebesar Rp 70 miliar untuk kantor anggaran daerah. Namun, perkiraan pendapatan dari pajak itu antara tahun 2005 dan 2010 hanya kurang dari Rp 10 miliar.[63] Pemerintah daerah terlihat sangat rileks dalam persoalan pajak pertambangan. Menurut salah seorang anggota DPRD, pemda tidak dapat menghasilkan satupun laporan terkait pendapatan pajak pertambangan sejak tahun 2001 dan dana tersebut dialihkan untuk insentif 'ekstra' yang dibayarkan oleh pengusaha tambang kepada para pejabat yang telah membantu mereka menghindari kewajiban pajaknya.[64]

Rita Widyasari memperoleh warisan jaringan kolusi dari ayahnya ketika ia menjabat sebagai bupati pada tahun 2010. Jaringan tersebut bekerja keras untuk memastikan bahwa dia menang telak dalam pilkada tahun 2010.[65] Jaringan tersebut lalu menjadi organisasi bayangan di belakang Widyasari, yang dikenal sebagai Tim 11. Tim ini mempengaruhi keputusan-keputusan terkait alokasi anggaran, penunjukan pejabat pemda,

---

[61] Evaquarta *op. cit.*
[62] *Ibid*
[63] *Ibid*
[64] *Ibid*
[65] Iskandar. 2010. RIta Dinyatakan Memenangkan Pilkada Kukar. Antara. 16 Mei 2010. <kaltim.antaranews.com/berita/3047/rita-dinyatakan-memenangkan-pilkada-kukar>

proyek-proyek pembangunan daerah, penawaran dan pengadaan barang dan jasa, serta penerbitan izin pemerintah daerah.[66] Anggota Tim 11, yang terdiri dari kroni-kroni Syaukani dan orang-orang yang ditunjuk oleh Widyasari, berasal dari berbagai latar belakang. Sebagaimana dijelaskan oleh Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, tim ini memfasilitasi proses penyuapan dan gratifikasi antara para investor/pengusaha dan Rita terkait penerbitan perizinan dari pemerintah daerah, maupun penggelapan dana publik dari berbagai proyek pembangunan daerah.[67] Khairudin (mantan anggota DPRD/organisasi pemuda Golkar) adalah dalang di balik Tim 11 dan mengkoordinasikan peran-peran anggota lainnya, termasuk dalam mengumpulkan uang dari penyuapan dan penggelapan.

Rita Widyasari juga membangun aliansi strategis dengan elite nasional lewat jaringan ayahnya di Partai Golkar. Setelah dia menempati jabatannya, ia menjalin kedekatan dengan dua pejabat Golkar nasional dari kubu Aburizal Bakrie, yaitu Azis Syamsudin dan Idrus Marham.[68] Pilihan tersebut sangat berkaitan dengan kepentingan bersama antara Widyasari dengan Aburizal dalam pertambangan batu bara. Aburizal memiliki investasi pertambangan batu bara yang besar di Kaltim lewat perusahaannya Bumi, dalam bentuk KPC, Fajar Bumi Sakti, dan Arutmin. Di sisi lain, Widyasari memiliki hubungan dengan usaha pertambangan lewat PT Sinar Kumala Naga, perusahaan pertambangan batu bara dimana ibunya, Dayang Kartini, adalah anggota komisaris dan pemegang saham terbesar.[69] Dayang Kartini juga

---

[66] Rangga Tranggana. 2027. Siapa "Tim 11" yang dibidik KPK terkait gratifikasi Kukar? *Jurnas.* 28 September 2017 < www.jurnas.com/artikel/22489/Siapa-Tim-11-yang-Dibidik-KPK-Terkait-Gratifikasi-Kukar-/>

[67] Nadlir, M. 2017. KPK Telusuri Peran Tim 11, Pengatur Proyek untuk Bupati Kukar Rita Widyasari. *Kompas.* 29 September 2017 <http://nasional.kompas.com/read/2017/09/29/05553921/kpk-telusuri-peran-tim-11-pengatur-proyek-untuk-bupati-kukar-rita-widyasari>

[68] Amran. 2016. Azis Syamsudin dinilai tidak layak Caketum Golkar. Ini alasannya! *Wartakutim.* 7 Mei 2016 <wartakutim.co.id/2016/05/07/azis-syamsudin-dinilai-tidak-layak-jadi-caketum-golkar/>

[69] Apriando, T. 2017. Who owns Indonesia's deadly abandoned coal mines? *Mongabay*. 25 Mei 2017. <news.mongabay.com/2017/05/who-owns-indonesias-deadly-abandoned-coal-mines/>

merupakan pemegang saham di dua perusahaan pertambangan batu bara lainnya: PT Lembu Swana Perkasa, dan PT Beringin Jaya Abadi. Di samping itu, saudara kandung Widyasari, Silvi Agustina, adalah pemilik dan Presiden Komisaris PT Alam Jaya Bara, maupun komisaris PT Sinar Kumala Naga.

Baik Azis Syamsudin maupun Idrus Marham bukan sekedar "penyampai pesan" Aburizal. Keduanya merupakan loyalis Aburizal yang kuat dan memiliki posisi yang tinggi di Partai Golkar dan di DPR. Azis menempati posisi Ketua Komisi Anggaran.[70] Azis juga merupakan anggota DPR dua periode dari Provinsi Lampung dan Ketua Tim Hukum dan Advokasi untuk Badan Pemenangan Pemilu Partai Golkar. Idrus Marham merupakan politisi senior Partai Golkar, anggota DPR satu periode (2009-2014) dan merupakan Sekretaris Jenderal Partai Golkar di bawah kepemimpinan Aburizal Bakrie dan Setya Novanto.[71] Posisi politiknya semakin meningkat ketika Presiden Jokowi menunjukknya sebagai menteri sosial pada tanggal 7 Januari 2018.[72] Namun, kemungkinan besar karir politiknya berakhir ketika Idrus ditetapkan sebagai tersangka korupsi dalam kasus penggelapan uang yang berkaitan dengan pembangunan PLTU di Riau dan akhirnya ditahan oleh KPK.

Azis Syamsudin dan Idrus Marham menggunakan pengaruh politiknya untuk mendukung kampanye pilkada Rita yang kedua sebagai calon bupati pada tahun 2010. Pada saat itu, Rita maju sebagai calon independen melawan calon dari Partai Golkar. Rita lalu membalas kebaikan itu lewat dukungannya kepada Azis Syamsudin sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar untuk memecah blok suara untuk Ade Komaruddin serta memastikan kemenangan Setya Novanto dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar pada tanggal 14-17 Mei, 2017 di Nusa Dua, Bali.[74] Hubungan antara Azis Syamsudin dan Rita Widyasari tidak hanya sekedar hubungan politis. Azis menunjuk Rita sebagai bendahara Kosgoro 1957 sebelum rekonsiliasinya dengan Agung Laksono[75], sementara Rita mengangkat Azis sebagai komisaris perusahaan tambang milik ibunya, Sinar Kumala Naga.[76]

---

[70] Prasetia, A. 2017. Gantikan Kahar Muzakir, Azis Syamsuddin Jadi Ketua Banggar DPR. *Detik*. 21 Februari 2017 <https://news.detik.com/berita/d-3428166/gantikan-kahar-muzakir-azis-syamsuddin-jadi-ketua-banggar-dpr>

[71] Simanjuntak, R.A. 2017. Yorrys Raweyai Tak Ingin Idrus Marham Dipertahankan. *Sindonews*. 18 Desember 2017 <nasional.sindonews.com/read/1266813/12/yorrys-raweyai-tak-ingin-idrus-marham-dipertahankan-1513600824>

[72] Sihombing, R.A. 2018. Alasan Jokowi Pilih Idrus Marham sebagai Menteri Sosial, *Liputan 6*. 17 Januari 2018. <http://news.liputan6.com/read/3230088/alasan-jokowi-pilih-idrus-marham-jadi-menteri-sosial>

[73] News Desk. 2018. KPK Detains Former Social Affairs Minister. *The Jakarta Post*. 1 Agustus 2018. <http://www.thejakartapost.com/news/2018/08/31/kpk-detains-former-social-affairs-minister.html>

[74] Firdaus, R.F. 2016. Bupati Kutai Kertanegara dukung Azis Syamsuddin di Munaslub Golkar. *Merdeka*. 15th May 2016 <www.merdeka.com/politik/bupati-kutai-kertanegara-dukung-azis-syamsuddin-di-munaslub-golkar.html>. Strategi Aburizal Bakrie dan Luhut B. Pandjaitan untuk menggunakan Azis Syamsudin dan Indra Bambang Utoyo sebagai pemecah suara untuk mendukung Novanto dan menghalangi Ade Komarudin dalam memenangkan pemilihan dalam putaran pertama disoroti oleh Hamdani, D. 2016. Manuver Luhut menangkan Novanto. *Gatra*. 20th Mei 2016 <www.gatra.com/fokus-berita-1/201659-manuver-luhut-menangkan-novanto>

[75] Nainggolan, J. 2016. Ini alasan Aziz Syamsuddin pilih Rita Widyasari jadi bendum Kosgoro 1957. *Rakyat Merdeka*. 13 Februari 2016 <www.rmol.co/read/2016/02/13/235604/Ini-Alasan-Aziz-Syamsuddin-Pilih-Rita-Widyasari-Jadi-Bendum-Kosgoro-1957>

[76] Lihat AD ART PT Sinar Kumala Naga. Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM 2017.

### 4.2 Toba Sejahtra – bisnis, politik, dan konflik kepentingan

Kegiatan bisnis Toba Sejahtra merupakan contoh kasus korupsi politik di mana penyatuan politik dan bisnis di industri batu bara menciptakan beragam dampak negatif sosial dan lingkungan.

Rita Widyasari dan Luhut Binsar Panjaitan sudah saling mengenal sejak lama lewat hubungan Luhut dengan keluarganya. Selama tahun 2017, sebelum ditahan karena menjadi tersangka korupsi, Rita bertemu dengan Luhut dua kali di Balikpapan saat rapat pimpinan nasional (rapimnas) Golkar pada tanggal 21-23 Mei[77], dan saat rapat koordinasi pemerintah nasional-daerah pada tanggal 14 Juli.[78] Luhut juga merupakan salah satu pimpinan senior Partai Golkar yang menghadiri upacara pelantikan Widyasari sebagai Bupati Kutai Kartanegara pada tanggal 30 Juni 2010, yang juga dihadiri oleh Aburizal Bakrie dan Akbar Tandjung.[79] Namun, tidak seperti Aburizal, Luhut tidak mengumumkan dukungannya untuk Rita secara terbuka ketika dia mengumumkan pencalonan dirinya sebagai Ketua DPD Golkar Kaltim pada tahun 2016 maupun pencalonan dirinya sebagai Gubernur Kaltim tahun 2018.[80] Rita juga merupakan loyalis Aburizal dan banyak elite Partai Golkar juga melakukan hal yang sama.

Hal yang menghubungkan Rita, Aburizal dan Luhut adalah pertambangan batu bara. Aburizal membantu Luhut merintis usaha pertambangan batu baranya pada tahun 2004.[82] Ia memulai usahanya lewat jaringan yang dimiliki oleh Bupati Kutai Kartanegara saat itu, Syaukani Hasan Rais, dalam mendirikan Adimitra Baratama Nusantara (ABN) sebagai anak perusahaan PT Toba Sejahtra.[83] Kehadiran Luhut pada upacara pelantikan Syaukani untuk masa jabatan kedua pada tahun 2005 menunjukkan kedekatan hubungan mereka.[84] Setelah Syaukani dipaksa mundur pada tahun 2006, Luhut terus mendapatkan dukungan pemerintah daerah dalam meluaskan usahanya di Kutai Kartanegara lewat perusahaannya, PT Toba Sejahtra.[85] Kemenangan Rita Widyasari sebagai bupati Kutai Kartanegara pada tahun 2010 memulihkan hubungan antara keluarganya dengan Luhut. Ia kemudian menerbikan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) bagi Trisensa pada tahin 2010[86], serta memperpanjang izin milik Indomining pada tahun 2013.[87]

---

[77] Ibrahim, M. 2017. Luhut di Rapimnas Golkar: Pikirkan Rakyat, Jangan Cuma Uang. *Detik*. 21 Mei 2017 <https://news.detik.com/berita/d-3507451/luhut-di-rapimnas-golkar-pikirkan-rakyat-jangan-cuma-uang>

[78] Gusdut. 2017. Pusat dorong strategi kebijakan diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi daerah. *PPID Kutai Kartanegara.* 19 Juli 2017 < http://ppid.kutaikartanegarakab.go.id/berita/detail/222>

[79] Rita-Ghufron resmi pimpin Kukar. 30 Juni 2010 <http://www.kutaikartanegara.com/news.php?id=2941>

[80] Ketua Golkar Kaltim, Rita atau Said Amin? Ical Maunya Mufakat. *Prokal.co.* 13 Maret 2016 http://kaltim.prokal.co/read/news/261004-ketua-golkar-kaltim-rita-atau-said-amin-ical-maunya-mufakat/1. Dukungan Aburizal dapat dilihat dalam proses akhir pemilihan Rita sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kaltim yang dilaksanakan di Jakarta seperti diceritakan Idris, A. 2016. Mahyunadi Walk-Out, Rita Sah Nahkodai Partai Golkar Kaltim. 27th August 2016 <http://kliksangatta.com/berita-4576-mahyunadi-walkout-rita-sah-nahkodai-partai-golkar-kaltim.html#page2>

[81] Hartono, B and Kuddu, M.A. 2015. Golkar Sah Dipimpin Aburizal Bakrie, Bupati Ini Langsung Sujud Syukur. *Tribun.* 19th May 2015 <http://kaltim.tribunnews.com/2015/05/19/golkar-sah-dipimpin-aburizal-bakrie-bupati-ini-langsung-sujud-syukur>

[82] Willy. 2016. Pengusaha adalah prajurit. 9th April 2016 <https://luhutpandjaitan.id/id/detil-artikel/28/Pengusaha-adalah-Prajurit>

[83] *Ibid.* See also <http://www.adimitra-baratama.co.id/page/company/about-adimitra.php>

[84] Semarak malam pisah sambut bupati Kukar. 14th July 2005 <http://www.kutaikartanegara.com/news.php?id=276>

[85] Sukirno. 2013. Inilah 16 Perusahaan Milik Luhut Pandjaitan. *Bisnis.com.* 3 November 2013. <industri.bisnis.com/read/20131103/44/184423/inilah-16-perusahaan-milik-luhut-pandjaitan>

[86] Lihat <http://www.tobabara.com/en/company-overview/corporate-information/subsidiaries/dprofile-pt-trisensa-mineral-utama/>

[87] Lihat <http://www.tobabara.com/en/company-overview/corporate-information/subsidiaries/dprofile-pt-indomining/>
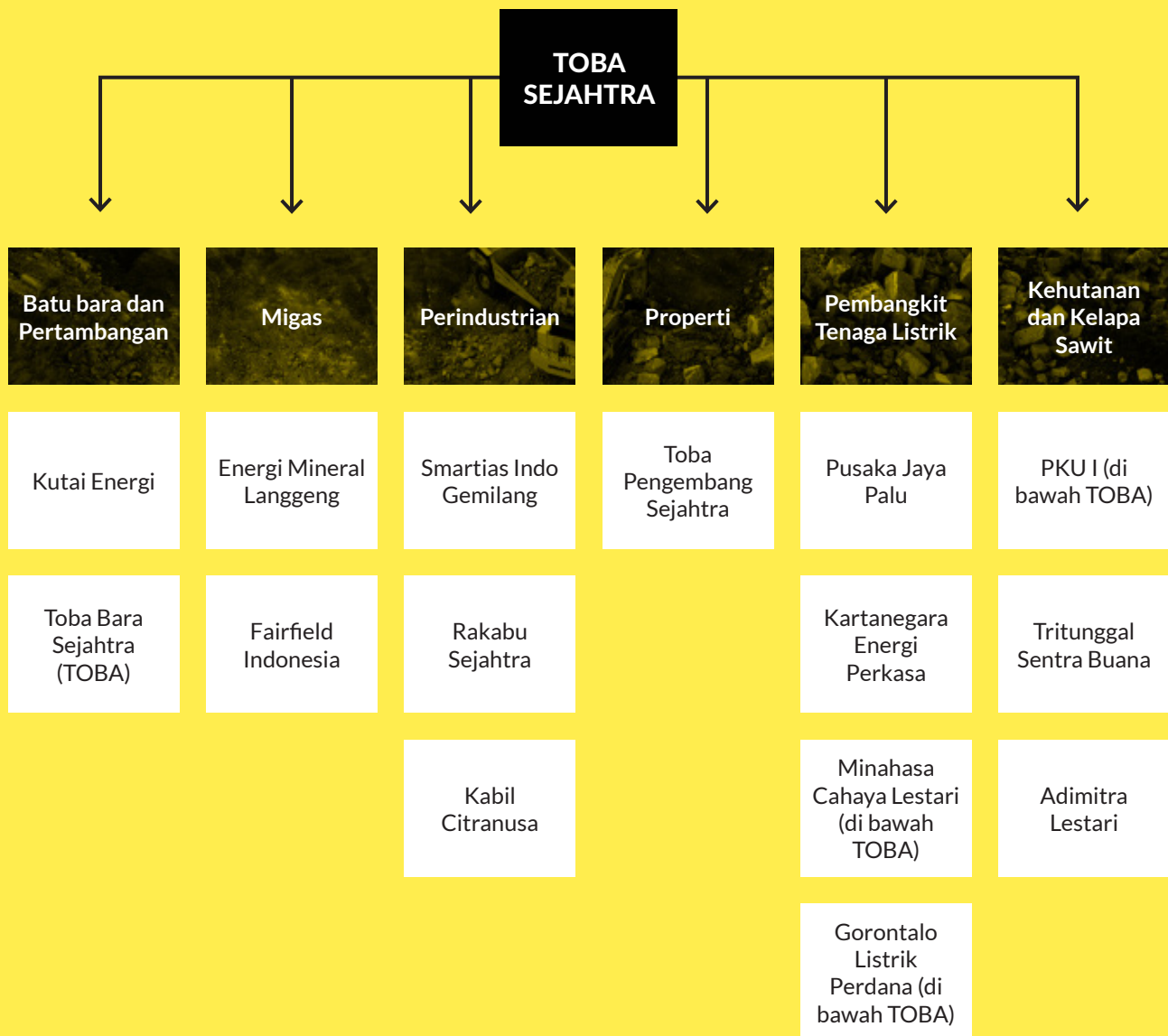
*Gambar 2.*
*Peta Grup Bisnis Toba Sejahtra*
***Sumber:*** *http://industri.bisnis.com/read/20131103/44/184423/inilah-16-perusahaan-milik-luhut- pandjaitan*

Usaha Toba Sejahtra telah berkembang pesat selama empat belas tahun belakangan. Perusahaan tersebut bertumbuh mulai dari usaha pertambangan batu bara dan meluas ke industri minyak dan gas, pembangkit listik, industri perkebunan dan perhutanan serta infrastruktur. Saat ini, terdapat 16 perusahaan di bawah payung kelompok ini[88] (Gambar 2). Meskipun terdapat berbagai usaha dalam kelompok ini, pertambangan batu bara di Kutai Kartanegara merupakan bagian penting grup bisnis ini.

Selain itu, meskipun Kutai Energi merupakan konsesi pertambangan batu bara terbesar dalam kelompok ini, tiga anak perusahaan pertambangan batu bara di bawah Toba Bara Sejahtra (TOBA) - ABN, IM, dan TMU, merupakan perusahaan yang tumbuh pesat di dalam kelompok ini. Pada tahun 2007, TOBA mengoperasikan tambang batu baranya yang pertama serta menghasilkan pendapatan sebesar 5 juta dollar AS.[89] Pada tahun 2008, TOBA menambahkan tambang batu bara yang kedua serta mampu menghasilkan 800 ribu ton dan menaikkan pemasukannya secara tajam hingga mencapai 49 juta dollar AS. Pada tahun 2011, TOBA membuka tambang batu bara yang ketiga, sehingga pada tahun 2011 TOBA menghasilkan 5,2 juta ton batu bara. Berkat naiknya harga batu bara sebesar 120 dollar AS per ton pada tahun 2011, TOBA mendapatkan pemasukan sebesar $498 juta dollar AS, sementara laba bersih yang diperoleh adalah 58 juta dollar AS.[90] Pencapaian ini cukup tinggi, khususnya mengingat bahwa modal bersih yang dimiliki TOBA hanya sebesar 59 juta dollar AS, sehingga laba atas investasi hampir mencapai 100 persen. Ketika laba bersih TOBA terus naik hingga tahun 2014, kekayaan pribadi Luhut pun naik dari Rp 7,1 miliar pada tahun 2001 menjadi Rp 660 miliar pada tahun 2015.[91]

Terdapat beberapa PEP dari jaringan Luhut dalam militer dan birokrasi yang terlibat dalam bisnis pertambangan batu bara. Contohnya, Jendral (Purn.) Fachrul Razi yang merupakan Komisaris di PT Toba Sejahtra bersama dengan Letjen (Purn.) Sumardi, sementara Letjen (Purn.) Suaidi Marasabessy merupakan Direktur Kutai Energi dan juga Presiden Direktur Utama TMU, dan Letjen (Purn.) Sintong Hamonangan Panjaitan menjadi Komisaris ABN. Luhut juga merekrut Jusman Syafii Djamal sebagai Komisaris Utama Toba Sejahtra dan TOBA sambil menjabat sebagai Komisaris di Kutai Energi. Sementara itu, Prof Dr Hamid Awaluddin menjabat sebagai Presiden Direktur Kutai Energi dan ABN. Selain itu, Luhut juga menempatkan Bacelius Ruru, SH, LLM dan Dr. Farid Harianto sebagai Komisaris Independen di TOBA. Meskipun Luhut disebutkan sebagai pemegang saham hanya di Toba Sejahtra, beserta anaknya David Togar Pandjaitan yang juga menjabat sebagai Komisaris Utama Kutai Energi, Toba Sejahtra merupakan pemegang saham mayoritas di Kutai Energi dan TOBA. Luhut juga terus mempertahankan kendali yang kuat dalam kelompok ini dengan menunjuk keponakannya, Pandu Patria Sjahrir, sebagai Direktur di TOBA dan ABN. Gambar 3 menunjukkan struktur kepengurusan usaha pertambangan batu bara milik Luhut di Kutai Kartanegara serta hubungan antara semua PEP dalam kelompok tersebut.

---

[88] *Op.Cit.* Sukirno. 2013.
[89] Hidayat, T. 2014. Toba Bara Sejahtra: return of coal? *Indonesia Value Investing*. 27 April 2014. <http://www.thpartner.com/2014/04/toba-bara-sejahtra-return-of-coal.html>
[90] Hidayat. *Op.Cit.*
[91] Evan. 2016. Pergaulan Luas Luhut Panjaitan, Harta Hingga Panama Papers. *Tempo*. 25 April 2016 <https://nasional.tempo.co/read/765726/pergaulan-luas-luhut-panjaitan-harta-hingga-panama-papers>

**Kotak 3.**
**Orang-orang Luhut**

Kedudukan para PEP dalam usaha pertambangan batu bara Luhut cukup mengesankan. Jabatan mereka sebagai berikut:

- **David Togar Pandjaitan** – anak Luhut Binsar Pandjaitan
- **Pandu Patria Sjahrir** – keponakan Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Asosiasi Pertambangan Batu bara Indonesia 2015-2018 dan 2018-2021
- **Fachrul Razi** – Kepala Staf Umum ABRI (1998-1999) dan Wakil Panglima TNI (1999-2000), Seketraris Jenderal Departemen Pertahanan (1999)
- **Suaidi Marasabessy** – Kepala Staf Umum ABRI (1999-2000)
- **Sintong Hamonangan Panjaitan** – Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (1985-1987)
- **Sumardi** - Komisaris PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (2015 – kini)
- **Jusman Syafii Djamal** – Menteri Perhubungan (2007-2009); Komisaris Utama PT Telkom Indonesia Tbk (2011) dan Garuda Indonesia (2014- kini)
- **Hamid Awaluddin** – Menteri Hukum dan HAM (2004- 2007), Dubes RI untuk Federasi Rusia dan Belarus (2008-2011)
- **Bacelius Ruru** – Direktur Jenderal Pembinaan BUMN (1995 -1998), Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara (2001-2004), Komisaris Utama PT Bursa Efek Jakarta (2001-2008), Komisaris Utama PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (2004-2008)
- **Farid Harianto** – Wakil Ketua Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) (1998 – 2000), juga pernah menjabat sebagai Penasihat Gubernur Bank Indonesia dan Staf Khusus Wakil Presiden Republik Indonesia

**Sumber:** berbagai sumber online

Para jenderal di perusahaan Luhut sudah saling mengenal sejak lama. Semua jenderal tersebut, kecuali Suaidi, merupakan rekan satu angkatan dengan Luhut di AKABRI angkatan 1970.[92] Pada bulan Maret 2014, mereka membentuk kelompok jenderal purnawirawan dari ABRI dan polisi yang “mengapresiasi” pencalonan Joko Widodo sebagai calon presiden oleh Megawati Soekarnoputri dan PDI-P.[93] Pada bulan Maret 2010, Presiden Yudhoyono mengundang Luhut, Fachrul, Sumardi dan Suaidi beserta tiga jenderal lainnya dari angkatan 1970 untuk membicarakan posisinya terkait proses pergantian presiden dalam pemilu 2014. Kelompok ini memiliki kepentingan politik serta kesetiaan pada Presiden Joko Widodo.

---

[92] Siregar, Z. 2013. Jenderal Tarto: Tujuh Jenderal yang Diundang Presiden SBY Berasal dari Satu Perusahaan. *Rakyat merdeka Online*. 14 Maret 2013 <http://www.rmol.co/read/2013/03/14/102231/Jenderal-Tarto:-Tujuh-Jenderal-yang-Diundang-Presiden-SBY-Berasal-dari-Satu-Perusahaan->

[93] 22 Purnawirawan jendral apresiasi pencapresan Jokowi. *Detik*. 14 Maret 2014 <https://news.detik.com/berita/2526338/22-purnawirawan-jenderal-apresiasi-pencapresan-jokowi>

**Kotak 4.**
**TOBA dan perluasan usahanya ke sektor pembangkit tenaga listrik**

Toba Sejahtra bukanlah pemain baru dalam usaha pembangkit tenaga listrik. Di bawah Toba Power, TOBA mengoperasikan satu pembangkit tenaga listrik di Palu, Sulawesi Tengah (PT Pusaka Jaya Palu Power, dengan kapasitas 2X15 MW hingga 40MW) sejak tahun 2007, dan satu lagi di Senipah, Kalimantan Timur (PT Kartanegara Energi Perkasa, kapasitas 2X41 MW hingga 2X60 MW) sejak tahun 2012. Pada tahun 2016, TOBA mulai berencana untuk meluaskan usahanya lewat proyek PLTU Sulbagut I di Gorontalo, Sulawesi Utara, dengan kapasitas sebesar 2X50 MW. Sebagaimana dikemukakan oleh Direktur Keuangan, Pandu Patria Sjahrir, TOBA akan meneruskan proyek ini di tahun 2018 dengan menggandakan pengeluaran modal dari 65 juta dollar AS ke 130 juta dollar AS untuk menyelesaikan proyek Sulbagut 1 serta mempersiapkan proyek PLTU berikutnya di Minahasa, Sulawesi Utara dengan kapasitas 2X50 MW. Perluasan ke usaha PLTU ini terkait dengan rencana ambisius pemerintah RI untuk memenuhi elektrifikasi di seluruh Indonesia pada tahun 2019, melalui program percepatan yang bertujuan untuk menambah kapasitas listrik sebesar 35GW. Batu bara, yang saat ini menghasilkan lebih dari setengah listrik yang dihasilkan di seluruh Indonesia, diproyeksikan masih mendominasi bauran energi masa depan: 20 GW dari kapasitas tambahan tersebut berasal dari batu bara. Kebijakan ini mendorong industri batu bara untuk bangkit kembali setelah mengalami penurunan harga di pasar internasional, dengan cara menciptakan permintaan yang lebih besar harga di pasar internasional, dengan cara menciptakan permintaan yang lebih kuat dari pasar domestik. Penunjukan Luhut sebagai pejabat sementara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang bertugas untuk mengatur kebijakan harga dan negosiasi harga antara industri PLTU dengan PLN jelas-jelas merupakan sebuah konflik kepentingan. Keputusannya untuk merevisi harga batu bara yang digunakan oleh PLTU juga dipertanyakan oleh publik.

**Sumber:**


1. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20161031183915-92-169195/garap-pltu-perusahaan-luhut-pandjaitan-cari-utang-dolar-as/
2. http://www.bareksa.com/id/text/2017/10/09/ini-alasan-toba-bara-lipat-gandakan-belanja-modal-jadi-rp-175-triliun-di-2018/16914/news
3. http://www.dunia-energi.com/revisi-harga-batu-bara-pltu-mulut-dorong-penuntasan-proyek-35-ribu-mw/

Penunjukan Luhut sebagai Menteri Koordinator Kemaritiman, yang membawahi sektor energi dan sumber daya mineral, pada tanggal 26 Juli 2016, menimbulkan kekhawatiran publik. Potensi konflik kepentingan makin besar saat Presiden Joko Widodo menunjuknya sebagai pejabat sementara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 15 Agustus 2016.[94] Kekhawatiran tersebut cukup kuat karena Luhut tidak melepaskan sahamnya di Toba Sejahtra. Walaupun Toba Sejahtra menjual sebagian besar sahamnya di TOBA kepada Highland Strategic Holding, perusahaan yang berbasis di Singapura, Luhut masih memepertahankan kuasanya atas Kutai Energi lewat Toba Sejahtra. Alasan di balik penjualan saham ini adalah untuk membiayai ekspansi TOBA di bisnis PLTU, dan bukan untuk merespons kekhawatiran publik terkait konflik kepentingan yang ditimbulkan oleh posisinya dalam kabinet Jokowi.[95]

Dalam beberapa tahun belakangan, TOBA telah mengalami penurunan laba, yang menimbulkan kekhawatiran bahwa Luhut dapat menggunakan jabatan untuk menguntungkan perusahaannya. Pada tahun 2012, harga batu bara mulai turun dan laba bersih TOBA turun menjadi 3,2 juta dollar AS. Setelah masa pemulihan pada 2013 dan 2014, laba bersih TOBA turun 31,80 persen pada tahun 2015 (11,36 juta dollar US)[96] dan kemudian turun lagi sebesar 75,44 persen pada tahun 2016 (2,79 juta dollar AS).[97] Dalam periode waktu ini, Luhut menggunakan posisinya untuk mendorong penggunaan batu bara untuk memperluas elektrifikasi di Indonesia, dan pada saat bersamaan, kepentingan TOBA di bisnis PLTU meningkat dengan pesat.

---

[94] Sasmito. 2016. Pengamat: Punya Kepentingan, Luhut Jangan Lama-lama Plt Menteri ESDM. *KBR*. 16 Agustus 2016 <http://kbr.id/berita/08 2016/pengamat__punya_kepentingan__luhut_jangan_lama_lama_plt_menteri_esdm/84119.html>

[95] Hartomo, G. 2017. Menko Luhut Jual Saham Toba Bara Rp1 Triliun, Digunakan untuk Apa? *Okezone.com*. 9 Oktober 2017 <https://economy.okezone.com/read/2017/10/09/278/1792017/menko-luhut-jual-saham-toba-bara-rp1-triliun-digunakan-untuk-apa>

[96] Siregar, D. I. 2015. Laba Perusahaan Luhut Panjaitan Anjlok 31,80%. *Metro TV News*. 4 Mei 2015 <http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/05/04/122291/laba-perusahaan-luhut-panjaitan-anjlok-31-80>

[97] Almawadi, I. 2017. Perusahaan Singapura Dapat Bagian Dividen Tunai TOBA Rp 6,89 Miliar. *Bareksa*. 26th May 2017 <http://www.bareksa.com/id/text/2017/05/26/perusahaan-singapura-dapat-bagian-dividen-tunai-toba-rp689-miliar/15597/analysis>

*Gambar 3.*
*Peta PEP dalam usaha pertambangan batu bara Toba Sejahtra*

***Sumber:*** *Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM 2018*

Terdapat praktik yang tesebar luas di Kalimantan Timur, termasuk di Kutai Kartenagara, untuk memberikan "perlakukan khusus dan perlindungan" bagi perusahaan pertambangan batu bara yang dimiliki oleh pejabat militer dan polisi, baik yang sudah pensiun maupun yang masih aktif. Pemerintah daerah melindungi perusahaan dari pengawasan publik dan langkah-langkah penegakan hukum.[98] Tri Giyarsa, Kepala Badan Geologi di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral di Kutai Kartanegara, mengatakan bahwa *"beberapa jenderal berkomunikasi langsung dengan bupati dalam upayanya untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan"*.[99] Awang Faroek, mantan Gubernur Kaltim, mengkonfirmasi hal tersebut, bahwa ia mengalami tekanan yang besar dari pejabat dan pensiunan militer ketika harus menegakkan hukum terkait dengan usaha pertambangan batu bara.[100]

Luhut bukanlah pensiunan pejabat militer biasa. Dia merupakan pengusaha yang lihai, dan memiliki pengaruh di tiga ranah: militer, Partai Golkar dan istana presiden. Hubungannya yang dekat dengan Presiden Joko Widodo membuatnya berbeda dengan politisi lainnya. Pada saat Joko Widodo masih menjalankan usaha mebel, Luhut merupakan salah satu rekan bisnisnya. Pada tahun 2009, keduanya mendirikan usaha bersama, PT Rakabu Sejahtra, yang menghasikan pintu, dek dan lantai kayu ketika Jokowi menjabat sebagai Walikota Solo. Jokowi membutuhkan persediaan kayu dan kebetulan Luhut sedang berusaha menambah nilai dalam usaha kayunya. Keduanya membentuk hubungan yang kuat, dan Luhut kemudian mengatakan bahwa *"Kami memulai suatu usaha bersama dan saling berteman dan saling mempercayai"*[101] Dalam kabinet saat ini, Luhut memiliki pengaruh yang lebih besar daripada para pemilik perusahaan yang berafiliasi dengan parpol lainnya, seperti Aburizal Bakrie (Bumi Resources-Golkar), Prabowo Subianto (Nusantara Group-Gerindra)[102] dan Hary Tanoesoedibjo (MNC Group-Perindo).[103]

Pengaruh Luhut di tingkat daerah sangat luas dan dalam. Terdapat berbagai contoh mengenai proses pembuatan kebijakan yang dapat diubah untuk menguntungkan kepentingan bisnisnya, ataupun regulator yang seharusnya melindungi kepentingan publik, namun malah melindungi kepentingan perusahaan Luhut dengan tidak menegakkan hukum atau membebaskan perusahaannya dari peraturan. Sudah lama Toba Sejahtra mengabaikan kewajibannya dalam hal perlindungan lingkungan, menyebabkan polusi, serta kasus sengketa tanah, namun pemerintah tidak mengambil tindakan terhadap Toba Sejahtra.

### 4.2.1 Lubang tambang yang ditelantarkan dan polusi air di lokasi

---

[98] Anonim. 2015. Di Kukar, "Tambang Berbintang" Aman: Tudingan Jatam atas Dokumen IUP yang Ditutupi. *Kaltim Prokal.* 13 Mei 2015 http://kaltim.prokal.co/read/news/226256-di-kukar-tambang-berbintang-aman

[99] Masbro. 2015. Ada Jenderal di Pertambangan Kukar? *Berita Kaltim.* 20 Januari 2015. http://newsbalikpapan.com/ada-jenderal-di-pertambangan-kukar.html

[100] Anonim. 2017. Gubernur Kaltim Ungkap Didatangi Jenderal Pemilik Tambang yang Gusar Izinnya Terancam Dicabut. *Banjarmasin Post.* 18 Mei 2017. http://banjarmasin.tribunnews.com/2017/05/18/gubernur-kaltim-ungkap-didatangi-jenderal-pemilik-tambang-yang-gusar-izinnya-terancam-dicabut

[101] Wibisono, A. 2014. The Thinking General. *Forbes Indonesia.* 14 November 2014. http://forbesindonesia.com/berita-769-the-thinking-general.html

[102] Tim Viva. 2009. Prabowo Kelola Belasan Perusahaan. *Viva.* 7 Mei 2009. https://www.viva.co.id/berita/bisnis/55712-prabowo-kelola-belasan-perusahaan

[103] Sari, N.I. 2013. Perusahaan Hary Tanoe Targetkan Produksi Batu Bara 3,5 juta ton. *Merdeka.com.* 2 Mei 2013. https://www.merdeka.com/uang/perusahaan-hary-tanoe-targetkan-produksi-batu-bara-35-juta-ton.html

**Kotak 5.**
**Rakabu Sejahtra – Siapa yang Memimpin?**

Hubungan bisnis antara Luhut dan Joko Widodo (Jokowi) sudah lama menjadi bahan spekulasi sejak pencalonan Jokowi sebagai Calon Gubernur Jakarta. Jokowi menerima undangan dari Luhut untuk menghadari Pertemuan Uji Kelayakan dan Ekspose Umum TOBA sebelum acara penawaran publik perdana (IPO) pada tanggal 11 Juni, 2012 di Ritz Carlton, Jakarta. Keduanya memiliki kepentingan yang sama dalam sektor pertambangan karena Jokowi pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Energi dan Pertambangan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Surakarta. Keduanya dipersatukan oleh usaha bersama di bidang meubel, yakni PT Rakabu Sejahtra. Perusahaan ini awalnya didirikan oleh Jokowi pada tanggal 21 Februari 1988 sebagai CV Rakabu. Pada tahun 2005, ketika dia terpilih sebagai Walikota Solo, Jokowi menyerahkan perusahaan tersebut kepada saudara kandungnya Anjas Widjanarko. Perubahan besar terjadi pada tahun 2009 ketika Luhut berinvestasi di perusahaan ini dan mengganti namanya menjadi PT Rakabu Sejahtra. Toba Sejahtra menjadi pemegang saham minoritas (15.557 saham) sementara anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, berperan sebagai komisaris yang memegang sebagian besar saham (16,193 saham) hingga tahun 2016, ketika ia digantikan oleh Kaesang Pangarep. Selain membawa masuk investasinya, Luhut juga membawa serta satu orang PEP ke dalam perusahaan ini, Letnan Jendral (Purn.) Agus Widjojo (mantan Kepala Staf TNI AD tahun 2000) sebagai komisaris utama. Luhut juga menempatkan Bambang Supriyambodo, tangan kanannya di PT Adimitra Lestari, sebagai komisaris dan Komisaris Utama. Pertanyaan seputar peran Luhut di perusahaan ini diangkat pada tahun 2013 ketika salah satu media masa (Bisnis.com) melaporkan bahwa Rakabu Sejahtra menjadi anak perusahana kelompok Toba Sejahtra di bawah kluster Toba Industri, bersamaan dengan PT Smartias Indo Gemilang dan PT Kabil Citranusa. Baik Rakabu Sejahtra maupun Toba Sejahtra tidak menyangkal hal ini. Setelah pabrik Rakabu Sejahtra hangus terbakar pada bulan April 2016, Arief Budi Sulistyo, direktur perusahaan dan saudara ipar Jokowi, menyatakan bahwa keluarganya sudah bukan pemilik perusahaan itu dan saat ini perusahaan dijalankan oleh “orang-orang profesional”. Pada tanggal 22 Juli 2017, operator terpercaya Luhut di Toba Sejahtra dan TOBA, Jusman Syafii Djamal, menduduki jabatan komisaris, menggantikan posisi staf kunci Toba Sejahtra lainnya, Sophi Fauzia.

**Sumber:**


1. http://bisnis.liputan6.com/read/2058893/dari-mana-asal-kekayaan-jokowi
2. https://www.antaranews.com/berita/556251/pabrik-mebel-rakabu-sejahtera-milik-keluarga-presiden-jokowi-terbakar
3. https://www.selasar.com/ekonomi/sepak-terjang-joko-widodo-sang-pengusaha-meubel
4. http://agroindonesia.co.id/2016/10/persaingan-orang-jokowi-dan-mantan-menko/
5. industri.bisnis.com/read/20131103/44/184423/inilah-16-perusahaan-milik-luhut-pandjaitan
6. San Sendi Dian Puspita Dewi (2010)

pertambangan

Toba Sejahtra bukanlah satu-satunya perusahaan pertambangan batu bara yang menghindari hukum dengan mengabaikan lubang tambang terbuka serta mencemari air tanah. Data di tahun 2016 menunjukkan bahwa terdapat 23 lubang tambang yang ditelantarakan di Kutai Kartanegara, yang dimiliki oleh Kutai Energi (10), Indomining (2), Adimitra Baratama Nusantara (7) dan Trisensa Mineral Utama (4). Data dari tahun 2017 menunjukkan bahwa 4 dari 10 lubang terbuka di daerah konsensi Kutai Energi tidak direklamasi. Di salah satu lubang terbuka Kutai Energi, air dari lubang tersebut mengalir ke Sungai Nangka tanpa disaring, meskipun terdapat kolam pengendapan.

Pengujian kualitas air di lubang tambang Kutai energi (S 00’46’04.4 E 117’08’00,7) dan Sungai Nangka (S 00’46’27.7” E 117’08’55’3”) menunjukkan bahwa terdapat tingkat keasaman dan tingkat kontanimasi logam yang tinggi di lubang tambang terbuka. Kualitas air juga lebih rendah dibandingkan standar peraturan pemerintah. Tabel 1 menunjukkan konsentrasi aluminimum yang tinggi, di atas standar yang ditetapkan, maupun kontaminasi vanadium, kobalt, boron dan talium.

Hasil tersebut konsisten dengan temuan JATAM

**Tabel 1.**
**Kontaminasi logam yang tinggi di air di lubang terbuka Kutai Energi dan sungai Nangka**

| No. | Logam berat | Standar yang ditetapkan oleh Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup No 113/2003 | Standar yang ditentukan oleh Peraturan Kementerian Kesehatan 416/1990 | Hasil dari lubang tambang Kutai energi | Hasil dari sungai Nangka |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PH | 6-9 | 6,5 – 8,5 | 3 | 4,6 |
| 2 | Alumunium | - | 0,2 mg/L | 10,3 mg/L | 1,72 mg/L |
| 3 | Vanadium | - | - | 0,005 mg/L | 0,0071 mg/L |
| 4 | Kromium | - | 0,05 mg/L | 0,0089 mg/L | < 0,0005 mg/L |
| 5 | Mangan | 4 mg/L | 0,1 mg/L | 4 mg/L | 1,2 mg/L |
| 6 | Kobalt | - | - | 0,146 mg/L | 0,0239 mg/L |
| 7 | Boron | - | - | <0,2 mg/L | <0,2 mg/L |
| 8 | Arsenik | - | 0,05 mg/L | 0,0026 mg/L | 0,0026 mg/L |
| 9 | Selenium | - | 0,01 mg/L | < 0,005 mg/L | < 0,005 mg/L |
| 10 | Besi | 7 mg/L | 0,3 mg/L | 6,75 mg/L | 5,51 mg/L |
| 11 | Kadmium | - | 0,005 mg/L | 0,0011 mg/L | < 0,001 mg/L |
| 12 | Barium | - | 1 mg/L | 0,042 mg/L | 0,045 mg/L |
| 13 | Air raksa | - | 0,001 mg/L | < 0,001 mg/L | < 0,001 mg/L |
| 14 | Timah | - | 0,05 mg/L | 0,0096 mg/L | < 0,05 |
| 15 | Talium | - | - | < 0.005 mg/L | < 0.005 mg/L |

***Sumber:** Hasil uji dari ALS Laboratory Group di Bogor, West Java*

(Jaringan Adokvasi Tambang) dan Unit Laboratorium Kesehatan/Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Terpadu Daerah (BLUD-UPTD) Kalimantan Timur pada tanggal 19 Mei 2015, yang mengidentifikasi tingkat keasaman air yang tinggi di Sungai Nangka, yang berlokasi di dekat lubang tambang milik Kutai Energi, maupun tingkat mangan dan besi yang tinggi.[104] Temuan JATAM membantah pernyataan sebelumnya dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Kaltim pada tanggal 11 Mei 2015, yang menyatakan bahwa tidak ada pencemaran di Sungai Nangka yang berasal dari kegiatan pertambangan Kutai Energi.[105] Beberapa sampel yang diambil oleh BLH satu tahun kemudian pada bulan Oktober 2016 pada akhirnya mengkonfirmasi tingkat keasaman air yang tinggi di Sungai Nangka dan mengindikasikan pencemaran yang parah.[106] Meskipun terdapat temuan ini, serta tekanan dari organisasi masyarakat sipil, belum ada tindakan terhadap perusahaan-perusahaan yang terlibat, ataupun perintah untuk menghentikan praktik-praktik pencemaran tersebut.

Dampak negatif dari praktik ini sangat besar. Di masa lalu, komunitas sekitar bergantung pada Sungai Nangka untuk pertanian, perikanan, dan air minum. Setelah pertambangan Kutai Energi mulai beroperasi, dan lubang-lubang terbuka ini ditelantarakan, air dari sungai berubah menjadi keruh dan tercemar, dan tidak dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, bahkan untuk air minum hewan ternak. Kutai Energi diindikasikan membuang air dari lubang tambang terbuka langsung ke dalam sungai tanpa disaring terlebih dahulu melalui kolam pengendapan.[107]

---

[104] Redaksi. 2017. Koalisi Petani dan Nelayan Tolak di Kukar PT PKU I dan PT Kutai Energi. *Pribumi*. 24 Januari 2017. http://pribuminews.co.id/2017/01/24/koalisi-petani-dan-nelayan-tolak-di-kukar-pt-pku-i-dan-pt-kutai-energi/

[105] JATAM. 2017. Kembalikan Tanah yang Dirampas oleh PT. Perkebunan Kaltim Utama I (Toba Sejahtra Group) Milik Luhut Binsar Panjaitan (Menko Bidang Kemaritiman) kepada Petani. 31 Januari 2017. https://www.jatam.org/2017/01/31/kembalikan-tanah-yang-dirampas-oleh-pt-perkebunan-kaltim-utama-i-toba-sejahtera-group-milik-luhut-binsar-panjaitan-menko-bidang-kemaritiman-kepada-petani/

[106] Setiawan, I. 2016. BLH Kaltim Temukan Sebab Pencemaran Sungai di Kutai Kartanegara. *Kliksendawar.com*. 7 Oktober 2016. http://www.kliksendawar.com/berita-72-blh-kaltim-temukan-sebab-pencemaran-sungai-di-kutai-kartanegara.html

[107] Wawancara dengan Rukka, Ketua Kelompok Tani Maju Bersama, September 2017.

### 4.2.2 Berbagai kasus sengketa tanah

Di samping kasus-kasus terkait perusakan lingkungan dan pencemaran, Toba Sejahtra terlibat dalam berbagai sengketa tanah. Bagaimana pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten) menangani kasus-kasus tersebut menggambarkan luasnya pengaruh Luhut di Kutai Kartanegara dan Kalimantan Timur. Di bawah ini terdapat tiga contoh:

- *Kutai Energi vs keluarga (alm.) Hamzah bin Cole (Putusan pengadilan No 527 / Pid.B / 2015 / PN.Trg and No. 03/Pdt.G/2016/PN.Trg).* Kutai Energi terlibat dalam kasus sertifikat tanah palsu saat membeli tahan untuk lokasi tambang di Desa Batuah, Loa Janan, Kutai Kartanegara. Kutai Energi membeli tanah dari H. Sapiah bin Mannan, yang menggunakan sertifikat palsu dengan mencantumkan nama-nama petani lainnya yang tidak ingin menjual tanahnya ke Kutai Energi. Pengadilan negeri memutuskan bahwa H. Sapiah bin Mannan dinyatakan bersalah dan divonis penjara satu tahun, namun Kutai Energi tidak dihukum karena membeli tanah secara ilegal. Ketika keluarga Hamzah bin Cole menuntut ganti rugi dengan cara memblokir operasi perusahaan di tanah yang disengketakan, Kutai Energi menuntut mereka untuk ganti rugi. Setelah anggota keluarga menuntut balik, pengadilan memutuskan untuk membatalkan kedua kasus *(niet ontvankelijke verklaard)* dan memutuskan bahwa tanah tersebut masih dimiliki oleh Hamzah bin Cole karena penjualan tanah tersebut dilakukan berdasarkan sertifikat tanah palsu. Namun, pengadilan tidak membatasi pergerakan perusahaan secara hukum atas status tanah tersebut.

- *PKU I vs Kutai Energi (Putusan pengadilan No 24 /G/2011/PTUN- SMD) dan vs Trisensa Mineral Utama dan Adimitra Baratama Nusantara (Putusan pengadilan 18/G/2011 /PTUN- SMD).* PKU I menuntut Kutai Energi, Trisensa Mineral Utama dan Adimitra Baratama Nusantara beserta Bupati Kutai Kartanegara karena wilayah yang diberikan untuk operasi pertambangan ketiga perusahaan tersebut pada tahun 2009 and 2010 tumpang tindih dengan daerah perkebunan PKU I, yang diberikan antara tahun 2004-2008. Setelah Kutai Energi, Trisensa Mineral Utama dan Adimitra Baratama Nusantara menuntut balik, pengadilan memutusakan bahwa tuntutan yang diajukan oleh PKU I tidak sah karena terdapat negosiasi yang sedang berlanjut antara semua pihak untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sementara itu, tuntutan tersebut telah melampaui jangka waktu yang diperbolehkan menurut hukum untuk dibawa ke pengadilan.

- Sengketa tanah yang terbaru merupakan kasus yang paling menarik. Sengketa

**Kotak 6.**
**Luhut dan kasus Kimco Armindo**

Di akhir tahun fiskal 2011, Toba Sejahtra menambahkan dua anak perusahan baru, di samping Kutai Energi dan TOBA, dalam rencana perluasan produksi mereka untuk tahun 2012. PT Kimco Armindo dan PT Pancaran Surya Abadi menetapkan target untuk meningkatkan produksi batu bara tahunan menjadi masing-masing 1 juta ton. Suheldi, Presiden Direktur Kimco, mengumumkan atas nama Toba Sejahtra terkait rencana mereka untuk membeli pertambangan batu bara di Kaltim. Namun, setelah tahun fiskal 2013, Kimco dan Pancaran tidak disebutkan sebagai anak perusahaan dalam segala pernyataan resmi Toba Sejahtra. Pernyataan dari Kimco Armindo pada tanggal 30 Maret 2017 menyatakan bahwa Luhut telah menjual perusahaan itu ke pemilik baru, PT Pandji Notonegoro, pada tanggal 12 Agustus 2015, segera setelah Luhut ditunjuk sebagai Kepala Kantor Staf Presiden dalam Kabinet Joko Widodo. Pada tahun 2017, terungkap bahwa Kimco tidak membayar dana jaminan reklamasi (Jamrek) secara penuh sebesar Rp 7 miliar, ataupun membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk Penggunaan Kawasah Hutan (PNPB- PKH) sejak tahun 2015 sebesar Rp 5,6 miliar. Selain itu, Kimco juga belum membayar gaji, tunjangan atau ganti rugi kepada pegawainya sebanyak 150 orang selama tiga tahun terakhir. Uang yang belum dibayarkan sebesar Rp 31 miliar. Namun, laporan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa masalah ini terjadi selama periode 2005-2009, jauh sebelum Kimco dijual ke pemilik baru pada tahun 2015. Kerahasiaan seputar proses perubahan kepemilikan ini antara tahun 2013-2015, maupun kehadiran Letjen (Purn.) Sumardi sebagai Komisaris di Toba Sejahtra maupun Kimco Armindo, telah menimbulkan keraguan terkait klaim bahwa Luhut tidak lagi berhubungan dengan atau dapat mempengaruhi perusahaannya dalam permasalahan yang dihadapi.

**Sumber:**

1. http://www.korankaltim.com/headline/read/9131/lebih-3-tahun-ratusan-karyawan-kimco-tak-gajian
2. http://poskotakaltimnews.com/read/967/pt-kimco-armindo-tidak-pernah-membayar-jamrek
3. http://www.kliktenggarong.com/berita-1732-menunggak-pajak-rp56-miliar-pt-kimco-kok-bisa-nambang.html
4. http://eksplorasi.id/singgung-nama-menteri-luhut-polisi-diminta-netral-dalam-kasus-tambang-kimco-armindo/

ini melibatkan PKU I (bagian dari TOBA) vs kelompok tani di Muara Jawa, Loa Janan, dan Sanga-Sanga (KT Gotong Royong, KT Untung Tuah Bersama, KT Sungai Mukun, KT Berkah Mulia, and KT Mandiri). Setelah kelompok tani memenangkan kasus melawan PKU I, TOBA membeli perkebunan kelapa sawit dari Ganda Group pada tahun 2013 untuk memastikan perlindungan lokasi pertambangan batu bara anak perusahaan Toba Sejahtra.[108] Namun, gugatan hukum lainnya di Jakarta, dimenangkan oleh aliansi kelompok masyarakat sipil Kaltim (Jatam Kaltim, Walhi, Pokja 30, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Prakarsa Borneo, Imapa Unmul, Barisan Advokasi Rakyat, Front Nahdliyyin Kedaulatan SDA Kaltim) dan kelompok tani di Muara Jawa, Loa Janan, dan Sanga-Sanga.[109] Pengadilan memutuskan bahwa PKU I dinyatakan bersalah atas pengambilan 1.300 hektar tanah untuk perkebunan secara ilegal serta mencabut izin yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk wilayah itu. Dengan putusan pengadilan tersebut, kelompok tani menuntut PKU I (kini dimiliki oleh TOBA) melepaskan tanah itu dari perkebunan dan mengembalikannya kepada penduduk desa.

Meskipun putusan pengadilan telah diumumkan, tidak ada tanda-tanda bahwa PKU I akan melepaskan

**Kotak 7.**
**Petani Lokal melawan PKU 1**

Para petani yang hidup di sekitar Sungai Nangka mulai menggarap tanah sejak tahun 1982. Mereka mendaftarkan kepemilikan tanah pada tahun 1987 dan mulai membayar PBB tahun 1997. Mereka menanam padi, buah-buahan dan sayur-sayuran. Hasil pertanian dan panen pun cukup bagus.

"Lahan ini sangat subur. Kami dapat hidup layak dari hasil tani. Kemudian perusahaan tambang datang dan mengambil tanah kami. Pemerintah daerah memberikan izin lokasi tanpa terlebih dahulu mengecek bahwa penduduk setempat sudah memiliki tanah tersebut," kata Rukka, Ketua Kelompok Tani Maju Bersama di Sungai Nangka, Desa Teluk Dalam, Muara Jawa, kabupaten Kutai Kartanegara. Bupati Kutai Kartanegara Syaukani Rais menerbitkan perizinan lokasi kepada PKU 1 pada tahun 2004 tanpa terlebih dahulu berkonsultasi dengan para petani lokal yang sebagian lahannya diberikan kepada PKU1.

Pada tahun 2007, para petani setempat tidak diperbolehkan mengakses lahan mereka sendiri, ketika PKU 1 mengklaim bahwa mereka memiliki lokasi dan izin usaha sah yang diterbitkan oleh pemda. Lahan yang dimiliki oleh para petani juga tumpang tindih dengan konsensi PT Kutai Energi, anak perusahaan PT Toba Sejahtra, yang hampir seluruhnya (99 persen) dimiliki oleh Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan.

"Kami ingin terus bertani. Kembalikan lahan kami. Jika kami dihalangi untuk menggarap lahan sebagai pertukaran dengan keterlibatan di dalam skema pembagian keuntungan perusahaan, kami akan terus berontak. PKU 1 telah melanggar hukum. Lahan kami harus dihapuskan dari konsesi," tambah Rukka.

**Sumber:** Wawancara dengan Rukka, Ketua Kelompok Tani Maju Bersama, September 2017

[108] Aksan, M. 2017. PT PKU 1 Milik Menteri Luhut Bantah Telah Merebut Lahan Warga. *Kliksamarainda.com*. 4 Februari 2017 http://www.kliksamarinda.com/berita-5009-pt-pku-1-milik-menteri-luhut-bantah-telah-merebut-lahan-warga.html

[109] Redaksi. 2017. Perusahaan Luhut Kalah di PTUN, Bupati Kukar Takut Eksekusi. *Berita Kaltim*. 24 Januari 2017. http://beritakaltim.co/2017/01/24/perusahaan-luhut-kalah-di-ptun-bupati-kukar-takut-eksekusi/

lahan itu dan mengembalikannya kepada penduduk setempat. Sebaliknya, PKU I menawarkan rencana pembagian laba 80:20 dari perkebunan kelapa sawit dalam perjanjian “inti-plasma”. Baik Gubernur Kaltim maupun Bupati Kutai Kartanegara, maupun DPRD, memilih jalur mediasi dibandingkan penegakan hukum dalam menyelesaikan sengketa ini. Awang Faroek, misalnya, meminta para petani untuk menerima tawaran PKU I dan menghentikan demonstrasi.[109] Sebaliknya, Rita Widyasari, tidak ingin terlibat dan memohon kepada para petani dan perusahaan untuk menyelesaikan sengketa ini secara langsung dengan BPN.

[110] Wadi, I. 2017. Atasi Sengketa Lahan, Rita Minta Warga Serahkan Bukti Sertifikat Sah ke BPN Kukar. *Warta Kaltim.* 16 Februari 2017. https://www.wartakaltim.co/2017/02/16/atasi-sengketa-lahan-rita-minta-warga-serahkan-bukti-sah-ke-bpn-kukar/

**Kotak 8.**
**TOBA dan hubungannya dengan Offshore Leaks**

*The Offshore Leaks* merupakan laporan yang diterbitkan pada bulan April 2013, yang membeberkan rincian 130.000 akun luar negeri. Laporan tersebut berasal dari International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) asal AS, yakni sebuah jaringan global yang terdiri dari lebih dari 190 jurnalis di lebih dari 65 negara yang berkolaborasi dalam investigasi mendalam. Database Offshore Leaks menerbitkan nama-nama lebih dari 100 ribu perusahaan yang disahkan secara hukum lewat Portcullis Trustnet dan Commonwealth Trust Limited. Pada tanggal 9 Mei 2016, ICIJ menambahkan lebih dari 200 ribu perusahaan akun luar negeri dari investigasi Panama Papers. Sumber-sumber lainnya yang dibocorkan termasuk Paradise Papers.

Pada tahun 2016, Majalah Tempo melaporkan bahwa berdasarkan laporan investigasi mereka, nama Luhut termasuk dalam Panama Papers sebagai direktur Mayfair International Ltd, yang terdaftar di kepulauan Seychelles. Perusahaan lepas pantai tersebut didirikan pada tanggal 29 Juni 2006 dengan dua perusahaan PT Persada Inti Energi dan PT Buana Inti Energi sebagai pemegang saham, di mana anak Luhut merupakan Presiden Direktur pada tahun 2011. PT Buana Inti Energi merupakan anak perusahaan PT Toba Sejahtra. Memang terdapat manfaat sah untuk mendirikan perusahaan dan akun lepas pantai, dan investigasi ICIJ tidak menunjukkan bahwa ada pelanggaran hukum. Namun, Luhut menyangkal keterlibatannya dalam Mayfair dan mengatakan bahwa *"Saya tidak pernah mendengar perusahaan itu. Kami belum pernah memiliki Mayfair".*

Namun, terdapat dua nama di posisi kunci di Toba Sejahtra yang juga terekam dalam basis data Offshore Leaks. Dicky Yordan merupakan direktur TOBA dan komisaris utama ABN, yang memperoleh jabatan tersebut setelah Toba Sejahtra menjual sebagian besar sahamnya kepada HSH. Ia tercatat sebagai pemagang saham dua perusahaan di kepulauan Virgin Britania Raya, yakni Pinnacle Lane Offshore Limited dan Yeomun Ltd. Tokoh lainnya adalah Djamal Nasser Atamimi yang merupakan Komisaris di TOBA dengan tiga koneksi dengan perusahaan dalam basis data Offshore Leaks, yakni Platinum Capital Venture dan MPC Capital Ltd (Pulau Virgin Britania Raya) dan Delta Advisory Pte Ltd (Singapura). Kehadiran Dicky dan Djamal dalam basis data ini melemahkan penyangkalan Luhut, terutama terkait hubungannya dengan perusahaan lepas pantai, seperti Mayfair International Ltd.

**Sumber:**

1. http://www.thejakartapost.com/news/2016/04/25/jokowi-summons-luhut-over-panama-papers-reports.html
2. https://offshoreleaks.icij.org
3. Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM 2018

# 05. Kesimpulan – Mengakhiri *Business as Usual*
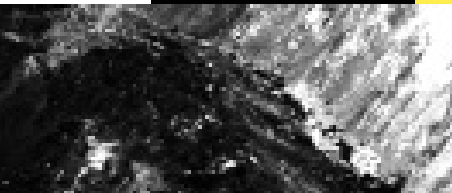
***"Dalam dunia bisnis, kita harus terus mengamati peta sebelum diserang. Pahami dukungan logistik kita, kekuatan intelijen, sumber daya manusia, dan amunisi yang kita miliki. Kita harus terus mengukur kekuatan kita dan kekuatan lawan kita"***
*(Luhut Binsar Panjaitan)*

Pertambangan batu bara merupakan sektor yang penuh dengan korupsi politik. Keterlibatan elite politik di tingkat nasional dan daerah sangat besar. Selain itu, pertambangan batu bara dan korupsi politik merupakan dua sisi koin yang sama, sehingga oleh majalah The Economist batu bara dijuluki sebagai salah satu sektor kroni. Akibatnya, usaha batu bara tidak hanya merusak lingkungan dan komunitas sekitar, namun juga merusak perekonomian dan sistem politik.

Perilaku Toba Sejahtra menggambarkan bagaimana korupsi politik terjadi dalam sektor pertambangan batu bara. Hal ini juga menggambarkan bagaimana korupsi politik di tingkat daerah berhubungan dengan dinamika yang lebih kompleks di tingkat nasional. Meskipun Luhut piawai berbisnis, dia tidak bekerja sendiri. Dalam kasus Toba Sejahtra, Luhut mampu menggunakan pengaruhnya, mengelakkan penegakan hukum, serta menghindari peraturan oleh karena beberapa faktor: kesenjangan dalam sistem peradilan, kekuasaan diskresioner dan proses pengambilan keputusan yang sangat terpolitisasi, lemahnya tata kelola di sektor batu bara, dan ketidakjelasan kepemilikan manfaat (beneficial ownership). Gabungan dari faktor-faktor tersebut memastikan bahwa konflik kepentingan dapat diabaikan atau tidak diperiksa. Selain itu, jaringan kolusi yang mendalam di Kaltim, berdasarkan struktur Partai Golkar dan militer, memampukan dan melindungi praktik-praktik korupsi dalam usaha pertambangan batu bara. Meskipun lanskap politik telah berubah dibandingkan era Soeharto, namun struktur oligarkinya masih sama.

Jadi, seperti apakah gambaran masa depan akan terlihat? Beberapa kejadian di tahun 2018 dapat memberikan beberapa petunjuk.

Pada tanggal 17 Januari 2018, Presiden Joko Widodo menunjuk Idrus Marham sebagai Menteri Sosial yang baru. Sebagaimana disebutkan di atas, Idrus menjabat sebagai Sekretaris Jenderal di bawah mantan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Ia menjabat dari tahun 2009 hingga 2017, hingga akhir periode kepemimpinan Setya Novanto. Penunjukan Idrus Marham dan keputusan Joko Widodo lainnya untuk mempertahankan Airlangga Hartarto – Ketua Umum Partai Golkar – dalam kabinetnya menunjukkan bahwa Jokowi beraliansi secara kuat dengan Partai Golkar, bukan hanya secara politis, tapi juga untuk dukungan keuangan dalam kampanye pemilu.

Kejadian kedua terjadi pada tanggal 22 Januari 2018, ketika Airlangga Hartarto mengumumkan struktur kepemipinan nasional Golkar yang baru. Airlangga mempertahankan Azis Syamsudin, loyalis Aburizal lainnya, dalam struktur kepemimpinan. Ia juga menunjuk Lodewijk Freidrich Paulus, mantan komandan Pasukan Khusus TNI AD dengan pengalaman politik yang sedikit, sebagai Sekretaris Jenderal. Diduga bahwa Lodewijk mendapatkan posisi tersebut karena dukungan dari Luhut.[111] Meskipun hal ini disangkal oleh Lodewijk, ia mengkonfirmasi hubungannya dengan Luhut. Dalam wawancara pertamanya dengan media setelah pengumuman struktur yang baru, ia mengatakan, *"Benar bahwa Luhut adalah komandan saya"*.[112]

**Rekomendasi aksi**

Meskipun Joko Widodo telah menyatakan secara terbuka bahwa *"tanpa pengelolaan yang benar, cadangan batu bara Indonesia hanya dapat bertahan selama 83 tahun ke depan"* dan *"kita harus menuntut penggunaan sumber daya secara bertanggung jawab"*, aksi politiknya dan kebijakannya tidak menunjukkan adanya perubahan dari sikap *business as usual*.[113] Korupsi politik dalam pertambangan batu bara sangat luas dan dampaknya terhadap komunitas, lingkungan dan perekonomian sepatutnya menimbulkan kekhawatiran. Namun, tidak akan ada perubahan yang signifikan jika lembaga pemerintah antikorupsi, seperti KPK dan Ombudsman, LSM antikorupsi serta masa media tidak bekerja sama untuk mengungkapkan dan mengambil tindakan melawan korupsi dalam bisnis pertambangan batu bara.

Terdapat beberapa langkah yang harus diambil untuk mengatasi korupsi politik dalam bisnis pertambangan batu bara:

- Memperkuat penegakan hukum dalam operasi pertambangan batu bara. Kelemahan yang ada saat ini adalah kehadiran PEP dalam kepemilikan dan kepemimpinan perusahaan batu bara.
- Memperkuat langkah-langkah hukum untuk mencegah konflik kepentingan di antara PEP, termasuk menciptakan perlindungan yang lebih kuat dari risiko kolusi dan campur tangan politik yang ditimbulkan oleh "fenomena keluar masuk" di mana orang seringkali berpindah jabatan antara sektor publik dan swasta.
- Menyoroti pemilik manfaat dalam usaha pertambangan batu bara. Jika pemilik perusahaan yang sebenarnya tersamar, publik tidak mungkin dapat mengetahui siapa yang mengendalikan perusahaan tersebut.
- Menyusun peta jalan untuk menutup bisnis pertambangan batu bara di Indonesia. Dampak terhadap lingkungan dan komunitas, pembangunan yang tidak berkelanjutan, dan konflik sosial yang timbul akibat pertambangan batu bara sangat luas dan tidak dapat dihindari. Sebuah peta jalan harus dibuat untuk melakukan transisi energi dari batu bara ke energi bersih dan terbarukan.

---

[111] Prireza, A. 2017. Sekjen Golkar Lodewijk Paulus: Pak Luhut Komandan Saya. *Tempo.co.* 22 Januari 2018. https://nasional.tempo.co/read/1052901/sekjen-golkar-lodewijk-paulus-pak-luhut-komandan-saya

[112] *Ibid*

[113] Redaksi. 2017. Jokowi: Cadangan Batubara RI Diprediksi Habis 83 Tahun Lagi. *Kumparan.* 10 Januari 2017 https://kumparan.com/@kumparannews/jokowi-cadangan-batubara-ri-diprediksi-habis-83-tahun-lagi

# Daftar Pustaka


Abdullah, M (Ed). 2017. *Administration of Coal Permit under Coordination and Supervision of KPK*. Publish What You Pay Indonesia and KPK. Jakarta.

Amundsen, I. 1999. Political Corruption: An Introduction to the Issues. *Chr. Michelsen Institute.* Bergen.

Aspinall, E. and van Klinken, G. 2011. The state and illegality in Indonesia. In The state and illegality in Indonesia (eds E. Aspinall and G. van Klinken), Ch 1, pp. 1-28. KITLV Press, Leiden.

Attwood, C *et al.* 2017. *Financial Supports for Coal and Renewables in Indonesia; GSI Report.* The International Institute for Sustainable Development. Winnipeg, Manitoba.

Cornot-Gandolphe, S. 2017. *Indonesia's Electricity Demand and the Coal Sector: Export or meet domestic demand?* Oxford Institute for Energy Studies, Oxford.

Dermawan, A *et al.* 2011. Preventing the risk of corruption in REDD+ in Indonesia. Working paper 80. *United Nations Office on Drugs and Crime and Center for International Forestry Research.* CIFOR. Jakarta and Bogor, Indonesia.

Devi, B. 2013. *Mining and Development in Indonesia: An Overview of the Regulatory Framework and Policies (Final Report).* IM4DC Action Research Report. University of Western Australia and University of Queensland.

Dewi, S.S.D.P. 2010. *Strategi Pemasaran Ekspor Produk Kayu Olahan pada Rakabu Furniture ke Negara Uni Emirat Arab.* Tugas Akhir. Fakultas Ekonomi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Diah, A.M. 2017. *The Politics of Patronage in Intergovernmental Financial Transfer: The Role of Local Elites in East Kalimantan Province, Indonesia.* Dissertation. College of Arts and Education, Victoria University Melbourne, Australia

Ernst & Young. 2010. *Fraud and corruption in mining and metals: Focus on business ethics. Ernst & Young.* London.

Evaquarta, R. 2008. Business and Political Actor Relationship in Indonesia's Local Autonomy Project: A Comparative Study on Batam City and Kutai Kartanegara Regency. *Paper to the 17th Biennial Conference of the Asian Studies Association of Australia in Melbourne 1-3 July 2008.* Department of Government & International Relations. The University of Sydney. Sydney.

Greenpeace. 2014. *Revealed: Coal Mines Polluting South Kalimantan's Water.* Greenpeace. Jakarta.

Hardoon, D. and Heinrich, F.  2011. *Bribe Payers Index 2011*. Transparency International. Berlin.

Harrington, M. 2017.  *An Own Coal? Energy Policy in Indonesia*. The Australia Institute. Canberra.

Jackson, T. and Green, K.P.  2017.  *Fraser Institute Annual: Survey of Mining Companies 2016*.  Fraser Institute. Calgary, Montreal.

Jorde, S.  2013.  Coal and Climate in Kalimantan Norwegian Interests in Indonesia's Environmentally Damaging Coal Expansion.  Discussion paper 04/2013.  *The Future in Our Hands.* Oslo.

Lucarelli, B.  2010.  The History and Future of Indonesia's Coal Industry: Impact of Politics and Regulatory Framework on Industry Structure and Performance. Working Paper 93, *Program on Energy and Sustainable Development*, Stanford University, Serra Mall, Stanford.

Macdonald, K.F. 2017. *The Risk Assessment of Corruption in the Awarding of Mining Permits*.  Transparency International Indonesia.  Jakarta.

OECD.  2016. *Corruption in the Extractive Value Chain: Typology of Risks, Mitigation Measures, and Incentives*. Preliminary version. OECD. Paris.

Pradiptyo, R., Wibisana, P.S., and Hilman, M. 2017. *Final Report: A Roadmap of Beneficiary Ownership Transparency in the Extractive Industries in Indonesia.* Coordinating Ministry of Economic Affairs. Jakarta. Indonesia.

Prasetyawan, W.  2005.  Government and Multinationals: Conflict over Economic Resources in East Kalimantan, 1998-2003.  *Southeast Asian Studies, Vol. 43, No. 2, September 2005*.  Kyoto University, Kyoto.

Sayne, A, Gillies, A. and A. Watkins.  2017.  *Twelve Red Flags: Corruption Risks in the Award of Extractive Sector Licenses and Contracts*.  Natural resources Governance Institute. New York.

Scrivener, A. and Lund-Harket, S. 2013.  *Banking while Borneo burns: How the UK financial sector is bankrolling Indonesia's fossil fuel boom*. World Development Movement. London.

United Nations.  2004.  United Nations Convention against Corruption. United Nations. New York.

Warburton, E.  2014.  The business of politics in Indonesia.  Inside Indonesia, edition 117, July-September 2014. http://www.insideindonesia.org/the-business-of-politics-in-indonesia-4

Waterkeeper' Aliance and Jatam.  2017.  *Hungry Coal: Coal Mining and Food Security in Indonesia*.  Jatam.  Jakarta.

Wicaksono, A.  and Maemunah, S.  2010.  Deadly Coal: Coal Extraction & Borneo Dark Generation. Jatam.  Jakarta.